



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI
(KMN) DI NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN RAO SELATAN
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI



**DHIEN YULITA
06115033**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO
NAGARI (KMN) DI NAGARI LANSEK KADOK
KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN**

Oleh :

**DHIEN YULITA
06115033**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO
NAGARI (KMN) DI NAGARI LANSEK KADOK
KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN**

Oleh :

DHIEN YULITA
06115033

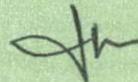
MENYETUJUI :

Dosen Pembimbing I



Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc
NIP. 195910311986031005

Dosen Pembimbing II



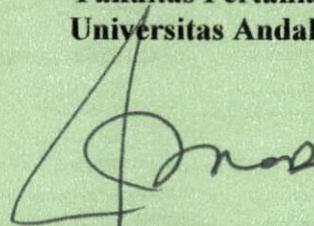
Syofyan Fairuzi, S.TP, M.Si
NIP. 197304082006041002

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



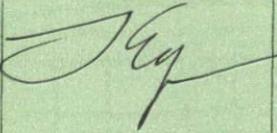
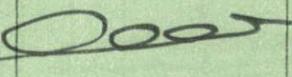
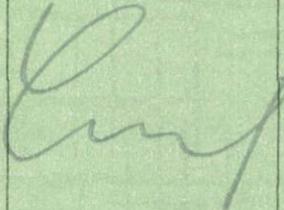
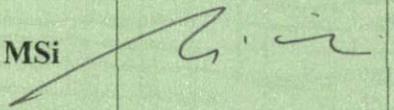
Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 19531216 198003 1 004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, PhD
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, pada tanggal 20 April 2012.

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr.Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MSi		Ketua
2.	Dr. Ir. Endry Martius, MSc		Sekretaris
3.	Dr. Ir. Osmet, MSc		Anggota
4.	Nuraini Budi Astuti, SP, MSi		Anggota



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **"Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman"**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr.Ir.Endry Martius, MSc dan Bapak Syofyan Fairuzi, S.TP, MSi sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan pengarahan dalam penyusunan proposal penelitian sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fasilitator Teknik dan Tim Pengelola Kegiatan serta seluruh pelaku KMN yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, April 2012

D.Y

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Fenomenadan Proses Kemiskinan	8
2.2 PenyebabKemiskinan	9
2.3 TinjauanUmumTentangKredit	11
2.4 KreditDalam Pembangunan Pertanian	15
2.5 PolaKreditGrameen Bank dan Program KMN	18
2.6 Usaha Kecil Menengah dan Mikro.....	20
2.7 Program Kredit Mikro Nagari.....	26
2.8 Efektifitas Program	28
2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit	29
2.10 Evaluasi Program	32
2.11 PenelitianTerdahulu	33
 III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2 Metode Dan Teknik Pengambilan Sampel	36
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Variabel Penelitian	38

3.5 Analisa Data	39
3.6 Defenisi Operasional	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	42
4.2 Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN)	46
4.3 Mendeskripsikan Karakteristik Pengguna Dana KMN ...	75
4.5 Manfaat yang Diperoleh Penerima Dana Program KMN ..	84
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel	<u>Halaman</u>
1. Potensi Sumber Daya Alam Nagari Lansek Kadok	43
2. Jumlah Penduduk Nagari Lansek Kadok Berdasarkan Umur	43
3. Sarana dan Prasarana Nagari Lansek Kadok	44
4. Sebaran Penduduk Miskin Nagari Lansek Kadok	46
5. Identitas Responden Penerima Program Kmn	48
6. Kesesuaian Persiapan Program KMN Nagari Lansek Kadok Dengan Juknis	54
7. Kriteria Penerima Dana KMN Nagari Lansek Kadok	56
8. Kesesuaian Perencanaan Program KMN Dengan Juknis	66
9. Kesesuaian Penyaluran dan Pencairan Dana KMN Nagari Lansek Kadok Dengan Juknis	69
10. Kesesuaian Pengawasan Program KMN Nagari Lansek Kadok Dengan Juknis	72
11. Kesesuaian Pelaporan Program KMN Nagari Lansek Kadok Dengan Juknis	73
12. Kesesuaian Proses Pelaksanaan Program KMN Dengan Juknis	74
13. Jenis Kelamin Pengguna Dana KMN	76
14. Umur Pengguna Dana KMN	77
15. Tingkat Pendidikan Pengguna Dana KMN	78
16. Jumlah Tanggungan Keluarga Pengguna Dana KMN	79
17. Pengalaman Usaha Pengguna Dana KMN	80
18. Pendapatan Pengguna Dana KMN	82
19. Jumlah Pinjaman Pengguna Dana KMN	83
20. Pengalaman Kredit Pengguna Dana KMN	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<u>Halaman</u>
1. Matriks Data Set Penelitian	91
2. Alokasi Dana Kredit Mikro Nagari Per Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Barat	93
3. Penetapan Nagari Dan Alokasi Program Kmn Tahun 2008	94
4. Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Kmn Tahun 2008	95
5. Pengembalian Dana KMN Kabupaten Pasaman Tahun 2008	96
6. Data Pembayaran Cicilan Kredit Januari 2009 – September 2010 ...	97
7. Data Pemanfaatan Dana KMN	99
8. Data Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan	102
9. Jumlah Sampel Penelitian	103
10. Surat Perjanjian Pemebrian Bantuan (SPPB)	104
11. Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Dana KMN	106
12. Berita Acara Musyawarah LPM dengan Pemerintahan Nagari	108
13. Berita Acara Musyawarah Kelompok	110

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **"Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman"**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr.Ir.Endry Martius, MSc dan Bapak Syofyan Fairuzi, S.TP, MSi sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan pengarahannya dalam penyusunan proposal penelitian sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fasilitator Teknik dan Tim Pengelola Kegiatan serta seluruh pelaku KMN yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, April 2012

D.Y

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI (KMN) DI NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN

ABSTRAK

Pengambilan data tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, telah dilaksanakan pada bulan Juni 2011 sampai dengan Juli 2011. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Responden ditetapkan 41 orang dari masyarakat penerima KMN, diambil secara *Simple Random Sampling*. Tujuan penelitian adalah 1). Mendeskripsikan pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok, 2). Mendeskripsikan karakteristik pengguna dana Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan KMN di Nagari Lansek Kadok belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah dan menyebabkan terhambatnya pengembalian dana KMN antara lain: a. Sosialisasi secara door to door membuka kesempatan memberikan dana pada sanak famili. b. Identifikasi penerima program tidak tepat mengakibatkan salah sasaran dalam pemberian dana. c. Penyusunan prioritas, pelaksana (wali jorong) masih memberikan dana kepada masyarakat yang tidak memiliki usaha (buruh/upahan). d. Penilaian usaha secara proscheking (acak). e. Sanksi sosial yang ditetapkan tidak dijalankan. f. Pengawasan dan pelaporan yang sangat minim semakin meningkatkan terjadinya tunggakan dalam pengembalian dana KMN di Nagari Lansek Kadok. Karakteristik pengguna dana KMN yang dilihat dari karakteristik personal, karakteristik usaha dan karakteristik kredit, meliputi: Umur pengguna yang menyatakan yang muda lebih produktif dari yang tua, rendahnya tingkat pendidikan, jumlah tanggungan yang banyak, dan pengalaman usaha yang minim, serta jumlah pinjaman yang banyak, dan pengalaman kredit yang baru, mengakibatkan terhambatnya pengembalian dana KMN.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya di Negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dari misteri kemiskinan ini di Indonesia, masalah sosial merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus (Suharto, 2005).

Menurut Jhingan (1999) *cit* Dewi (2008), hambatan yang paling erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal, kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau kurangnya investasi didalam produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatan perkapita rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi lebih lanjut hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha menurun.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat digolongkan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinn yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik dari segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat itu. Sementara, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi, dan kolusi, serta tatanan perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu (Baswir, 2003).

Besarnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat cukup mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan data Susenas, jumlah penduduk miskin di Sumbar tahun 2009 untuk daerah perkotaan mencapai 106.181 jiwa (6,84 persen) atau menurun dari tahun 2008 lalu yakni 115.780 jiwa (7,5 persen). Sementara itu untuk penduduk dipedesaan justru meningkat dari 323.843 jiwa (10,88 persen) dari 313.480 jiwa (10,6 persen).

Pemerintah Daerah Sumatera Barat meluncurkan sebuah program penanggulangan kemiskinan yang berbasis Nagari yang memberikan harapan bagi pemerintah pada level bawah (nagari) mampu untuk membantu taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan tersebut ditujukan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan pemberian pinjaman dana bergulir untuk modal usaha yang akan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat miskin di era otonomi daerah merupakan suatu upaya menggali dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dengan sistem dana bergulir. Selama ini upaya pemberdayaan masyarakat miskin telah di implementasikan dalam berbagai program seperti: Impres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PKK), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) dan lainnya belum banyak yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan belum banyak yang berhasil memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat (Daniel, 2007).

Program KMN merupakan program penanggulangan kemiskinan di tujukan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dirancang khusus oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang penyaluran dananya dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten untuk diteruskan kepada nagari yang merupakan salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khusus rumah tangga miskin melalui penyediaan Kredit Mikro nagari (KMN) sebagai tambahan modal usaha, dimana sumber pembiayaan program ini berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Petunjuk Teknis Operasional, 2008).

Adapun dasar hukum pelaksanaan program kredit mikro ini yaitu : 1.) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemangunan Nasional. 2.) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3.) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 4.) Impres Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. 5.) Kepmen Kokesra Nomor 05/Kep/Kesra/II-2006 tentang Pedum Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 6.) Peraturan Bupati Pasaman tentang Penetapan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari Tahun 2008. (Petunjuk Teknis Operasional, 2008)

Dalam rangka menaggulangi kemiskinan perlu dilakukan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat miskin melalui penguatan ekonomi dan mata pencaharian dengan memberikan kemudahan mengakses permodalan, berupa bantuan/kredit untuk usaha-usah produktif yang dikelola oleh masyarakat miskin di nagari. Agar penanggulangan kemiskinan efektif maka prinsip penyelenggaraannya haruslah semaksimal mungkin mengikutsertakan institusi lokal, sehingga penanganannya diharapkan akan lebih memiliki komitmen yang tinggi dan konsisten. Institusi lokal itu sendiri diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari, karena Pemerintah Nagari dinilai mampu memahami pendekatan kelompok diwilayahnya, melalui ikatan emosional yang dekat dalam memberdayakan masyarakatnya yang miskin (Petunjuk Teknis Operasional, 2008). Tidak efektifnya pelaksanaan program berupa bantuan dana ini diakibatkan rendahnya kesadaran dan lemahnya hukum yang berlaku serta kurangnya bimbingan pengawasan dalam pemanfaatan bantuan. Masyarakat tidak merasa rugi bila bantuan yang diberikan tidak bisa menghasilkan sesuatu begitu juga mereka tidak merasa mempunyai beban hutang tersebut harus dibayarkan kembali (Daniel,2007).

Dengan Kredit Mikro Nagari (KMN) ini masyarakat yang tadinya sudah “mulai bangkit” dapat lebih diberdayakan lagi dengan memupuk usaha-usaha mereka sendiri. Di nagari-nagari penduduk miskin tidak seluruhnya miskin karena tidak punya modal, mereka hanya butuh modal kecil yang tak lebih dari Rp 1 juta untuk usahany. Di nagari yang memiliki pasar tradisional, bertebaran para

pemberi modal rentenir yang amat mencekik. KMN, justru salah satu ditujukan untuk menjauhkan masyarakat miskin dari lilitan utang pada rentenir (Bambang Istijono, Bappeda Sumbar 2009).

Pengertian pemberdayaan dalam konteks ini adalah memberikan bantuan modal usaha tetapi diiringi dengan pertanggung jawaban produktif melalui proses perilaku positif (jujur, produktif, kerja keras dan memahami arti kerja usaha). Pendampingan oleh Pemerintah Nagari dan kelompok usaha yang terus menerus membimbing rumah tangga miskin akan membawa mereka mampu menjadi orang yang produktif. Kedekatan kekerabatan dalam lingkup nagari juga akan membangkitkan kepedulian semua orang akan upaya penanggulangan kemiskinan (Petunjuk Teknis Operasional, 2008).

Pola KMN yang menggulir dan bergilir penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin maka citra buruk tentang dana bergulir adalah “dana habis dan hibah” seperti yang selama ini melekat di nagari-nagari mulai diperbaiki. Caranya adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi sosial yang ada di nagari tersebut yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda. Semua melakukan pengawasan agar dana yang disalurkan tetap bergulir dan bergilir kepada penerima berikutnya. Dalam menggerakkan perekonomian keluarga miskin maka perlu dilakukan intervensi terhadap keluarga miskin dengan menyediakan KMN sebagai tambahan modal usaha.

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan melalui program KMN dimaksud untuk memberikan stimulus modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu yang belum tersentuh program-program nasional adalah intervensi modal usaha bagi masyarakat miskin yang bisa lebih mempercepat lagi kebangkitan mereka dari garis kemiskinan dan kemudian diharapkan mampu berdiri sendiri. Program KMN di maksud untuk memberikan stimulus modal usaha bagi masyarakat di nagari-nagari agar mereka cepat keluar dari garis kemiskinan.

Di Kabupaten Pasaman tepatnya di Kecamatan Rao Selatan terdiri dari 3 nagari yang mana salah satu nagarinya adalah Lansek Kadok yang terdiri dari 5 jorong yaitu Jorong Pasar Langsek Kadok, Jorong Koto Panjang, Jorong Rambah, Jorong Beringin, Jorong Koto Nopan dengan jumlah keluarga miskin pada tahun 2008 adalah sebesar 443 KK, untuk itu diperlukan program yang dibutuhkan masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan, dimana yang berjalan saat ini adalah program Kredit Mikro Nagari (KMN). Alokasi dana KMN ini sebesar Rp. 300.000.000 untuk nagari ini. KMN merupakan program yang disosialisasikan pada tingkat nagari, kemudian pemerintah nagari yang membuat suatu perencanaan dan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan inisiatif, kreatifitas, dan mengakomodasi kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan kriteria individu penentuan penerima kredit mikro terdiri dari : Individu yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data BPS) yang memiliki kemauan dan kemampuan usaha sedangkan untuk pemula diharapkan bergabung dengan kelompok usaha sejenis, mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang telah ada yang tidak bermasalah dengan penggunaan dana bergulir dimasa lalu, mendapat persetujuan dari institusi, lembaga atau kekerabatan setempat, mempunyai usaha ekonomi produktif, kelompok yang telah mendapat bantuan dari instansi lain tidak diprioritaskan menerima dana KMN, kelompok atau individu non KK miskin yang telah mempunyai usaha dan mempunyai kemauan bergabung atau bekerja sama dengan kelompok usaha KK miskin. Diharapkan dari penentuan kriteria individu ini akan mempercepat tercapainya maksud, tujuan dan sasaran dari bantuan Kredit Mikro Nagari (Petunjuk Teknis Operasional, 2008).

Program Kredit Mikro Nagari (KMN) dengan sistem pinjaman modal bergulir ini mulai di implementasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Pasaman di Nagari Lansek Kadok pada bulan Oktober 2008 - sekarang. Tujuan dari program KMN ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dalam usahanya yang dilaksanakan melalui pola dana bergulir (*revolving fund*) dari satu kelompok ke kelompok lain. Meskipun kriteria penerima dana KMN telah disepakati bersama, namun sejauh ini masih ada

penerima dana KMN yang tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati, sehingga menimbulkan terganggunya sistem perguliran, dan dalam pelaksanaan Program KMN masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima dana tersebut namun tetap mendapatkan bantuan, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dana KMN yang sifatnya pinjaman bergulir harus dikembalikan dengan cara mencicil. Berbagai masalah dalam implementasi pengembalian, terutama masalah macetnya pembayaran cicilan yang dilakukan oleh penerima dana KMN ini. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti :

1. Bagaimana pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Bagaimana Karakteristik pengguna dana KMN di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Pasaman.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman**”.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Mendeskripsikan karakteristik pengguna dana Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada penentu kebijakan, khususnya pemerintah di daerah setempat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dalam merumuskan program-program untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Dari sudut pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama secara akademis khususnya tentang mekanisme pelaksanaan Kredit Mikro Nagari sebagai suatu program pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan informasi bagi kepentingan studi dimasa yang akan datang.
3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk melihat keterkaitan antara teori dengan yang telah dipelajari di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fenomena dan Proses Kemiskinan

Ramainya pembicaraan tentang kemiskinan tentu banyak masalah tersebut belum selesai. Ibarat suatu penyakit yang serius melanda Negara-negara yang sedang berkembang. Menurut Astrid *cit* Nia (2009), mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang harus diperhatikan dan ditanggulangi, karena hal tersebut menjadi beban dan penghambat pembangunan. Kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat (Pakpahan 2004).

Berbeda dengan pandangan yang melihat kemiskinan sebagai suatu fenomena, akan tetapi lebih merupakan proses yang disebabkan dengan lebih tajam dan menitik pada akar permasalahan yang dihadapi. Kemiskinan dilihat sebagai proses yang disebabkan dari berbagai faktor, dalam hal ini kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang dipengaruhi secara sistematis yang didalamnya dipengaruhi oleh banyak aspek. Kemiskinan dibentuk dari kondisi suatu negara dari waktu ke waktu, secara tersirat kemiskinan dapat dianalisis menggunakan dimensi waktu dan sistem, dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi tereduksi melalui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi sumber daya manusia, selain itu manajemen dan distribusi sumber daya tersebut (Teguh *cit* Dewi, 2008).

Definisi klasik kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya (SMERU, 2002). Kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi per kapita di bawah suatu standar tertentu yang kemudian disebut garis kemiskinan. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin. Menurut SMERU (2002), kemiskinan berwajah majemuk sehingga untuk memahaminya harus memperhatikan dimensi-dimensi kemiskinan, yaitu: 1)

kerentanan, 2) ketidakberdayaan, dan 3) ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (*voicelessness*).

Menurut Esmara (1986) pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup layak dan bila tingkat pendapatan tidak dapat mencapai tingkat minimum maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin, sehingga diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum yang memungkinkan mereka memperoleh kebutuhan dasarnya. Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan memperoleh tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar antara keadaan miskin dan tidak miskin atau bias disebut garis kemiskinan. Konsep ini dikenal dengan kemiskinan mutlak atau kemiskinan absolut.

Kemiskinan biasanya dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan natural, dan kemiskinan relatif. Pengertian kemiskinan struktural merujuk kepada situasi dimana fenomena kemiskinan disebabkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan. Kemiskinan natural menggambarkan fenomena kemiskinan sebagai akibat dari miskinnya sumber daya alam yang menghidupi masyarakat. Adapun miskin relatif adalah kemiskinan yang merujuk pada situasi komparatif antar kelompok dengan kelompok (Pakpahan, 1993).

2.2 Penyebab Kamiskinan

Penyebab kemiskinan dapat digolongkan sebagai berikut : kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan didalam masyarakat itu. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi, kolusi serta perekonomian

internasional yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu (Baswir, 2003).

Menurut Suharto(2005) dalam melihat kemiskinan khusus dari perspektif individual dan kultural, kemiskinan disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individu yang bersangkutan. Seorang miskin karena malas tidak mau bekerja atau tidak memiliki etos wirausaha. Sebaliknya perspektif internasional struktural memandang bahwa seorang miskin sosial yang tidak kuat, tidak adil bahkan menindas.

Menurut SMERU (2002) penyebab kemiskinan adalah: 1) Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, 2) Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi guncangan-guncangan, dan 3) Tidak adanya suara yang mewakili dan terpukul dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat.

Sumodiningrat (2003), menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yakni : 1) rendahnya taraf pendidikan,dimana taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki, 2) rendahnya derajat kesehatan dan gizi, dimana taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. 3) terbatasnya lapangan kerja, dimana keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan yang diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, 4) kondisi keterisoliran, dimana banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang artinya adalah kepercayaan (*truth* atau *faith*), maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Kasmir, 2004).

Menurut Tucker kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat/mampu membayar dengan nilai/harga yang sama diwaktu yang akan datang. Sedangkan menurut Amir R. Batubara, kredit adalah suatu pemberian prestasi yang kontrak prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang (Hadiwidjaja dan Wirasmita, 2000).

Secara formal definisi kredit menurut UU Perbankan Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan penyaluran dana atau perkreditan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan debitur dalam rangka kegiatan konsumsi atau produksi. Dalam pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Untuk itu bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal prospek usaha debitur dan agunan (Suyatno, 2003).

Menurut defenisi yang dipakai dalam *microcredit summit* (1997) cit Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.

Pemberian kredit itu sendiri bertujuan untuk turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan

masyarakat dan memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya (Suyatno dkk, 2003).

Menurut Hadidwijaja dan Wirasmita (2000) fungsi kredit dijalankan untuk berbagai kegunaan:

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa, seandainya suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran dengan adanya kredit lalu lintas barang dan jasa dapat berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran, bila kelebihan dana pada orang yang mempunyai pendapatan lebih besar dari kebutuhannya dipindahkan pada golongan yang berpendapatan lebih kecil dari kebutuhannya maka itu menjadi efektif.
3. Kredit dapat dijadikan sebagai alat pengendali harga. Fisher Equation menyatakan bahwa uang yang beredar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Untuk jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan mempermudah pemberian kredit pada masyarakat, dan sebaliknya untuk mengurangi peredaran uang dimasyarakat maka dilakukan pembatasan kredit.
4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Salah satu macam kredit yang bisa diberikan oleh Bank Umum adalah kredit rekening Koran. Begitu perjanjian kredit ditanda tangani dan persyaratan panarikan kreditnya dipenuhi, maka telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit tersebut.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

Menurut Kasmir (2002) unsur-unsur yang terdapat didalam kredit adalah :

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan, dimana kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menanda tangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, faktor kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mampu membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah.
5. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang disebut dengan bunga. Disamping itu balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan pendapatan bank.

Ditinjau dari penggunaannya, kredit dibedakan atas kredit produktif dan konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk memperlancar pembiayaan suatu usaha produktif. Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hadiwidjaja dan Wirasmita, 2000).

Batubara *cit* Anggraini (2005) mengatakan bahwa kredit yang disalurkan ke daerah pedesaan pada umumnya dimaksud untuk tujuan produktif. Namun karena kebutuhan konsumtif belum terpenuhi maka pengalihan tujuan kredit tidak dapat dihindarkan.

Dalam masyarakat pedesaan disatu pihak kita melihat keperluan kredit yang hampir tidak pernah terpenuhi, sedangkan dipihak lain badan-badan kredit formal dalam kenyataannya menyediakan sebagian kecil saja dari keperluan akan kredit tersebut. Sudah banyak dilaporkan bahwa salah satu sebabnya pemberian kredit kepada petani di Negara-negara yang sedang berkembang adalah karena kredit pertanian lebih sedikit bagi keperluan produksi dan lebih banyak untuk keperluan konsumsi. Dalam hal demikian maka tidak mengherankan bahwa yang paling mudah bagi lembaga perkreditan adalah menolak pemberian kredit tersebut (Mubyarto, 1994).



Prinsip pemberian kredit yang dianalisa dengan 5C kredit adalah :

1. *Character* yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.
2. *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
3. *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition* yaitu kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing (Kasmir, 2002).

Untung (2000) menyatakan bahwa, kredit berdasarkan kolektibilitasnya dalam surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dibedakan menjadi :

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan dibawah ini :
 - Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga, cerukan, dan penarikan.
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit masa angsurannya kurang dari 1 bulan), atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
 - Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
2. Kredit kurang lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan (tetapi belum melampaui 2 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan atau melampaui 3 bulan (tetapi belum melampaui 6 bulan) bagi kredit yang ditetapkan 2 bulanan atau 3 bulanan atau melampaui 6 bulanan dan belum melampaui 12 bulan kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.

- Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
 - Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi angsuran kreditnya 1 bulan atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi angsurannya yang melebihi 1 bulan.
3. Kredit yang diragukan, yaitu tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti tersebut pada pin 1 dan 2, tetapi kredit tersebut (akan) dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai kurang dari 75% dari utang debitur, atau tidak bisa diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai kurang dari 100% dari utang debitur.
4. Kredit macet yaitu :
- Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, dan diragukan seperti poin 1,2 dan 3.
 - Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau belum ada usaha pelunasan kredit.
 - Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BPUN) atau diajukan penggantian rugi kepada Kantor Asuransi Kredit.

Adapun langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank adalah tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Adakalanya beberapa kredit memiliki kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya (Suyatno, 2003).

2.4 Kredit Dalam Pembangunan Pertanian

Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1989: 12).

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus kepada sektor pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia khususnya hidup di daerah pedesaan dan umumnya mempunyai sumber kehidupan disektor pertanian (rumah tangga pertanian). Berdasarkan hal ini, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan dibidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan, dan taraf hidup petani.

Salah satu ciri pertanian rakyat di Indonesia adalah manajemen dan permodalan yang terbatas. Menurut Soekartawi (1986), modal dalam usahatani diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Dengan demikian pembentukan modal mempunyai tujuan yaitu menunjang pembentukan modal lebih lanjut, dan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani.

Kesulitan permodalan yang dialami petani akan mempengaruhi ruang gerak aktifitas produksi usahatani dari petani. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertanian pada khususnya adalah melalui kredit. Kredit sebagai salah satu syarat pelancar dalam pembangunan pertanian, karena tanpa adanya kredit, pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan pertanian, karena tanpa adanya kredit, pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian akan berjalan lambat. Untuk produksi yang lebih baik, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang sarana produksi. Petani dengan uang banyak akan mampu untuk membeli sarana produksi yang produktif sehingga akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi (Mosher, 1992).

Ciri khas kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba (Mubyarto, 1989 : 35). Penciptaan modal untuk petani dapat dilakukan dengan menyisihkan kekayaan (menabung), akan tetapi pada umumnya petani jarang memiliki kapital tinggi. Hal ini mengakibatkan investasi untuk usahatani selanjutnya sangatlah kecil karena akumulasi modal sangatlah sulit untuk dilakukan. Atas dasar inilah,

pemerintah meluncurkan kebijakan perkreditan untuk membantu petani kecil mendapatkan modal sekaligus untuk mengembangkan usahanya. Kebijakan pemerintah mengenai program kredit usahatani, khususnya usahatani padi dan palawija, telah mengalami berbagai perubahan dalam pelaksanaannya.

Sejarah kredit pertanian diawali dengan adanya kredit program untuk Padi Sentra pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan Program Bimbingan Massal (BIMAS) pada tahun 1966 dan 1969 menjadi Bimas Gotong Royong. Pada tahun 1970 Bimas Gotong Royong diubah menjadi Bimas yang disempurnakan sampai dengan tahun 1985. Pada tahun 1985 kredit Bimas diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT), kredit program sektor pertanian tersebut digulirkan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi pertanian. Sejak dikeluarkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pendanaan kredit program (termasuk KUT), sehingga semua kredit program yang bersumber dari KLBI dihapuskan mulai dari tahun 2000. Sebagai pengganti skim pembiayaan pertanian maka diluncurkan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP), adalah kredit untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan, dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Penyaluran KUT dan KKP relatif sama dengan beberapa penyesuaian pada tingkat pelaksanaan kredit. Perbedaan antara KUT dan KKP terletak pada sumber pendanaan dan tanggung jawab terhadap resiko kredit. Sumber dana KUT berasal dari KLBI dan resiko kredit ditanggung pemerintah, sementara sumber dana KKP berasal dari bank pelaksana sebesar 50 persen. Sisanya ditanggung oleh konsorsium (untuk KKP tanaman pangan), sementara KKP pada komoditas selain pangan resiko kredit sepenuhnya ditanggung bank pelaksana. Program KUT dan KKP dimaksudkan untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usahatannya agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya serta mewujudkan ketahanan pangan.

2.5 Pola Kredit Grameen Bank dan Program KMN

Pola Grameen Bank merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara memberikan kredit mikro kepada masyarakat miskin tanpa agunan. Tujuan utama dari Grameen Bank adalah pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan akses perbankan bagi masyarakat miskin, mengurangi eksploitasi orang miskin oleh rentenir, menciptakan peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan kerja serta memberikan penguatan berorganisasi (kelompok) bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan dari program ini adalah menciptakan kesempatan kerja yang produktif bagi tenaga kerja terutama wanita rumah tangga miskin. Sasarannya adalah terciptanya usaha produktif di berbagai bidang usaha bagi tenaga kerja atau masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka (Yunus, 2006).

Yunus (2006), mengemukakan diperlukan keyakinan pemberi kredit bahwa masyarakat miskin penerima kredit juga mampu mengembalikan pinjaman selama mereka diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya. Pemberi kredit sebaiknya memberikan kelonggaran waktu apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Jika hal ini dilakukan, penerima kredit akan merasa bertanggung jawab dan bersemangat atas kepercayaan yang diberikan tersebut.

Menurut Yunus (2006), pemberian kredit kepada seseorang tidak didasarkan dari jumlah jaminan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi lebih didasarkan kepada potensi seseorang untuk mengembalikan pinjamannya. Prinsip Grameen Bank percaya bahwa semua orang termasuk yang paling miskin sekalipun mempunyai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Pemberian pinjaman dengan metoda Grameen Bank dimulai pertama kali sejak tahun 1976 di Bangladesh yang dipelopori oleh Muhammad Yunus. Pemberian pinjaman ini untuk keluarga miskin untuk dapat menggunakan pinjaman tersebut dalam kegiatan wirausaha tanpa khawatir dirinya tidak akan mampu untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

Prinsip pola Grameen Bank tidak berbeda jauh dengan pola KMN yang saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia. Program Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan program penanggulangan kemiskinan ditingkat nagari dengan memberikan stimulan modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Strategi yang digunakan dalam penyaluran bantuan KMN adalah: (a) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin baik penduduk laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh jaminan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat serta terwujudnya keterbukaan, akuntabilitas/pertanggungjawaban, (b) Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola potensi dan sumber daya sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan, (c) Peningkatan kapasitas nagari, peningkatan kemampuan nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan wilayah nagari. Selain itu meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat (BPD, LPM dan lembaga lainnya) dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan nagari, (d) Perluasan kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan aksesibilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi nagari, (e) Peningkatan sinergitas program pembangunan oleh pemerintah dalam konteks pemerintahan nagari (Juknis KMN, 2008).

Selanjutnya menurut (Juknis KMN, 2008) pendekatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan KMN adalah: (a) Pelaksanaan program KMN dilakukan dengan bertumpu pada kelompok masyarakat (*Community Based Development*), (b) Penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha yang diselenggarakan melalui mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nagari sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal, (c) Pemberian kredit permodalan diprioritaskan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro, (d) KMN dilaksanakan melalui sistem bergulir dan bergilir dalam rangka memperluas capaian kelompok sasaran keluarga miskin, (e) Optimalisasi peranan kelompok

kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah dan LSM dalam pengelolaan Kredit Mikro Nagari (KMN), (f) Pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga keuangan lokal (BPR, LPN, Baitul Mal) sebagai penatausahaan keuangan Program KMN, dan (g) Peningkatan peran dan fungsi ninik mamak, bundo kandung, alim ulama, tokoh masyarakat dan parantau dalam pengembangan jaminan sosial.

KMN diberikan kepada kelompok keluarga miskin nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya (sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia) yang ada di nagari. Komponen kegiatan yang dibantu dan difasilitasi dengan program KMN, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari (KMN), yang meliputi:
 - Biaya administrasi dan supervise bank
 - Biaya pendamping/fasilitas/pembinaan (SPMN)
3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan kredit mikro dan kegiatan pemerintahan ditingkat nagari.
4. Kredit mikro nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial lainnya.

2.6 Usaha Kecil Menengah dan Mikro

Pengertian tentang usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Mengacu pada Undang-Undang No. 9 tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah : (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), (2) memiliki hasil penjualan paling banyak 1 milyar/tahun. Untuk criteria usaha menengah : (1) untuk sector industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 5 milyar dan (2) untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta juga tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 milyar (Partomo dan Rahman S. 2002).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. UMKM ini menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, memberikan nilai tambah, meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menciptakan rasa aman, damai, adil, demokratis, serta sejahtera. (Kiryanto *cit* Nia, 2009).

Karena itu merupakan satu keharusan dan membina mengembangkan usaha kecil, agar mereka tumbuh sebagai komponen dunia usaha yang kuat, tangguh efisien dan mandiri sertamampu memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan dan pendapatan masyarakat (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2004).

Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM serta peran pemerintah untuk memperluas akses pasar melalui pemberian fasilitas teknologi informasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai media komunikasi bisnis global. (Kiryanto, 2007).

Ada beberapa lembaga/instansi dan UU yang memberikan definisi dan kriteria Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), diantaranya adalah: Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Lembaga dan Negara Asing.

Definisi dan kriteria yang disampaikan dari masing-masing lembaga/instansi dan UU berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun dapat kita simpulkan menjadi:

➤ Usaha Mikro adalah:

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar dan memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang.

➤ Usaha Kecil adalah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). Usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang. Memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 milyar. Badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) yang memiliki aset tetap/kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati) sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta - 600 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100 juta s/d Rp. 1 milyar per tahun.

➤ Usaha Menengah adalah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.. Industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 milyar. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta s/d Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun. Aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp. 200 – 600 juta).

Besarnya jumlah pekerja, yaitu :

- Kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar,
- Usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 - 9 orang,
- Usaha menengah, sebanyak 20-99 orang.

➤ Usaha Besar adalah:

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2003. Kriteria dari UMKM perlu diketahui oleh para pelaku UMKM itu sendiri agar dapat menyesuaikan usahanya. Terutama dalam berhubungan dengan pihak lain (lembaga keuangan bank/non bank dan rekan bisnis) termasuk pula untuk penyesuaian dokumen legal (surat-surat ijin).

Adapun kriteria dari UMKM adalah sebagai berikut :

➤ Kriteria Usaha Mikro adalah:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

➤ Kriteria Usaha Kecil adalah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta - Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta s/d Rp 2,5 milyar. Nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp. 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp. 1 milyar.

➤ Kriteria Usaha Menengah adalah:

Batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) adalah Rp.. 200 juta s/d Rp. 10 milyar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta s/d Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.5 milyar - Rp. 50 milyar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada tiga kategori ukuran ketenagakerjaan didalam UMKM yaitu :

- Disebut usaha mikro apabila mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar.

- Disebut usaha kecil apabila mempekerjakan 5-10 orang.
 - Disebut usaha menengah apabila mempekerjakan 20-99 orang.
- (Kiryanto, 2007)

Adapun ciri-ciri dari usaha UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

- Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap
- Tempat usahanya tidak selalu menetap
- Belum memiliki administrasi keuangan
- Sumber daya manusianya masih memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah
- Belum memiliki akses perbankan
- Tidak memiliki izin usaha

2. Usaha Kecil

- Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap
- Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap
- Sudah melakukan administrasi keuangan
- Sudah memiliki izin usaha aatu persyaratan legalitas lainnya
- Sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwira usaha
- Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal
- Belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik

3. Usaha Menengah

- Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik
 - Telah melakukan manajemen keuangan
 - Telah melakukan aturan atau pengelolaan
 - Sudah memiliki segala persyaratan legalitas
 - Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
 - Telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik
- (Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengan, 2003).

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Pengertian UMKM

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada masa sekarang UKM masih memiliki banyak kelemahan dan perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antar instansi.

Tujuan pembinaan UKM tersebut adalah : Perkembangan perkreditan nasional merupakan cermin dari dinamika investasi dari sektor riil, sekaligus pemacu proses pematangan sistem ekonomi secara keseluruhan. Sumber-sumber dana yang tersalurkan ke dalam investasi-investasi diberbagai sektor ekonomi menjadi pertanda bahwa sistem perekonomian berjalan atas dasar dukungan sektor moneter. Alokasi dana perbankan baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya sangat mempengaruhi situasi investasi sehingga segala kebijakan perkreditan yang ada akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian secara umum (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2004).

Bank Indonesia mengenalkan berbagai bentuk perkreditan untuk masyarakat lapisan bawah, dengan maksud agar mereka memperoleh akses yang memadai terhadap sumber dana yang ada. Sejumlah besar tenaga kerja terlibat di dalam ragam usaha kecil baik dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa lainnya. Kebijakan yang digariskan Bank Indonesia untuk mengembangkan usaha kecil tidak saja untuk member kredit yang diperlukan, tetapi jugamembantu masalah-masalah lain yang terkait, seperti : alternatif jaminan kredit, pengembangan kelompok, bantuan pemasaran, latihan, bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia secara umum.

2.7 Program Kredit Mikro Nagari

Bantuan Kredit Mikro Nagari (BKM) merupakan program penanggulangan kemiskinan ditingkat nagari dengan memberikan stimulan modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari agar mampu berkembang secara berkelanjutan (TKPK, 2007).

Strategi yang digunakan dalam penyaluran bantuan Kredit Mikro Nagari adalah :

- Peningkatan partisipasi masyarakat miskin baik penduduk laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh jaminan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat serta terwujudnya keterbukaan akuntabilitas/ pertanggung jawaban.
- Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola potensi dan sumber daya sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan.
- Peningkatan kapasitas nagari, peningkatan kemampuan nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan wilayah nagari. Selain itu meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat (BPD, LPM dan lembaga lainnya) dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program nagari.

- Perluasan kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan aksesibilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi nagari.

Pendekatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan KMN adalah :

- Pelaksanaan program kredit mikro dilakukan dengan bertumpu pada kelompok masyarakat (*community based development*).
- Penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha yang diselenggarakan melalui mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nagari sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal.
- Pemberian kredit permodalan diprioritaskan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro.
- KMN dilaksanakan melalui sistem bergulir dan bergilir dalam rangka memluas capaian kelompok sasaran keluarga miskin.
- Optimalisasi peranan kelompok kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah LSM dan pengelolaan Kredit Mikro Nagari.
- Pemanfaatan dan pemberdayaan keuangan lokal (BPR, LPN, Baitul Mal) sebagai pefiata usahaan keuangan program KMN.
- Peningkatan peran dan fungsi ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, tokoh masyarakat dan perantau dalam pengembangan jaminan sosial.

KMN diberikan kepada kelompok keluarga miskin nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya (sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia) yang ada di nagari. Komponen kegiatan dibantu dan difasilitasi dengan program KMN, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari, meliputi :

- Biaya administrasi dan supervise bank
 - Biaya pendamping/ fasilitas/ pembinaan (SPMN)
3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan kredit mikro dan kegiatan pemerintahan di tingkat nagari.
 4. Kredit Mikro Nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial lainnya.

2.8 Efektifitas Program

Menurut Israel. A (1992) konsep efektifitas bersifat relatif menurut lokasi atau kegiatan, teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu menurut Agustus. A (1999) usaha untuk menilai efektifitas dan membuat perbandingan antar wilayah sektoral teknologi sering menimbulkan masalah metodologi yang serius. Lebih lanjut ia katakan bagaimana misalnya membandingkan antar program yang sama pada lokasi yang berbeda, jenis program yang berbeda pada lokasi yang sama atau jenis program yang berbeda pada lokasi yang berbeda.

Konsep efektifitas lebih luas dan harus meliputi kapasitas suatu program dapat mencapai tujuan operasional secara tepat. Dalam konteks ini efektifitas program adalah seberapa jauh program berjalan dibandingkan dengan seperangkat standarnya sendiri. Tapi menurut Israel. A (1992) efektifitas juga dapat diukur menurut standar yang sifatnya eksternal dari suatu program. Tidak ada konsensus dalam literatur tentang standar eksternal mana yang harus dipakai. Keberhasilan, kegagalan, dan dampak dari suatu program tidak hanya ditentukan oleh program itu sendiri, tetapi dalam banyak hal ditentukan juga oleh program-program lain yang berkaitan dengannya (Agustus. A, 1999).

Nafziger (1990) dalam bukunya *the economics of developing countries* *an individual project should be evaluated in relation to other project, and not in isolation*. Konsep Nafziger ini pada pokoknya menekankan bahwa suatu program maupun proyek pembangunan dapat berhasil baik mampu melakukan sinergi dengan program atau proyek-proyek lain.

Sistem interaksi/sinergitas antar program terutama dapat memberikan gambaran dan keterkaitan dan saling ketergantungan (independensi) antar

program baik secara ekologi, ekonomi dan sosio-kultural. Identifikasi dan pengembangan potensi antar program dapat dijadikan dasar acuan bagi daerah terkait dalam suatu wilayah dalam mengembangkan dan mengelola secara bersama-sama sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang dimiliki wilayah tersebut melalui sinergi program daerah dan wilayah tersebut.

2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melunasi kewajibannya dalam mengembalikan kredit menurut Sukmadi dan Sudrajat (1994) dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu pendapatan dimana bila pendapatan mereka bertambah maka peminjam akan cenderung melunasi kewajibannya. Selain pendapatan, kemampuan peminjam maupun kelompok dalam mengelola kelompok akan sangat mempengaruhi peminjam. Semakin baik pengelolaan suatu kelompok, semakin besarlah kesadaran anggotanya dalam melunasi kewajibannya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peminjam untuk mengembalikan kredit yaitu adanya bencana alam yang mengakibatkan terjadinya kegagalan panen. Hal ini akan mengakibatkan petani tidak menerima hasil usahanya sehingga petani tidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu kebijakan pemerintah juga menjadi penentu mau tidaknya petani membayar kredit. Sikap pemerintah yang sering kali melakukan pemutihan terhadap kredit pertanian menimbulkan persepsi dikalangan petani bahwa kredit dari pemerintah tidak perlu dibayar (Sukamadi dan Sudrajat, 1994).

Syukur, dkk (1999) juga mengatakan bahwa semakin meningkat faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pengembalian pinjaman (kredit) dipengaruhi oleh karakteristik petani yang digolongkan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu petani dan faktor eksternal berupa situasi ekonomi, situasi penunjang non ekonomi, dan kondisi finansial petani. Faktor yang berperan positif bagi petani dalam membayar kredit diantaranya : pengetahuan terhadap kredit dan pengalaman berusaha, penagihan yang dilakukan oleh petugas, dan nisbah antara pendapatan dengan jumlah pinjaman kredit yang diterima.

Sementara itu, yang berperan negatif atau yang menimbulkan kecenderungan peminjam tidak membayar kembali pinjamannya adalah : tingginya pengeluaran konsumsi keluarga, dan nisbah jumlah kredit dan penerimaan yang diterima oleh peminjam.

Menurut Haloho (2008) menyatakan bahwa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengembalian kredit terdiri dari faktor jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dalam keluarga yang merupakan karakteristik personal. Sedangkan karakteristik usaha yang diduga berpengaruh terhadap pengembalian kredit meliputi pengalaman usaha, total pendapatan usaha. Selain itu karakteristik yang diduga berpengaruh terhadap pengembalian kredit adalah jumlah pinjaman dan pengalaman kredit.

1. Karakteristik Personal

Jenis kelamin wanita diduga memiliki loyalitas yang lebih besar dan lebih mampu menjaga kepercayaan yang diberikan Bank dalam memenuhi kewajiban angsuran kredit dibandingkan pria. Semakin tinggi tingkat pendidikan menunjukkan kemampuan manajerial yang semakin baik dalam pengelolaan usaha dan jumlah tanggungan dalam keluarga berpengaruh negatif karena semakin banyak tanggungan keluarga semakin besar pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang sedianya digunakan dalam pengembalian kredit.

2. Karakteristik Usaha

Semakin lama keberadaan usaha penerima maka dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga mendukung usaha yang digeluti dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan serta memberikan peluang kemampuan pengembalian kredit secara lancar. Semakin besar pendapatan maka kemampuan membayar angsuran dan beban bunga akan semakin besar sehingga peluang pengembalian kredit dengan lancar juga semakin besar.

3. Karakteristik kredit

Semakin besar jumlah pinjaman yang diterima maka akan memperbesar beban angsuran dan bunga yang harus dibayar sehingga menurunkan peluang pengembalian kredit secara lancar. Semakin sering peminjam memperoleh pinjaman kredit menunjukkan bahwa kredibilitas peminjam tersebut tidak diragukan lagi dalam memenuhi angsuran kredit.

Sementara itu, Sanin *cit* Syukur, dkk (1999) menyatakan bahwa faktor pendorong pengembalian kredit adalah pengalaman menerima kredit, keterlibatan dalam Penyusunan Rencana Definit Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah tabungan kelompok tani, dan frekuensi pembinaan oleh PPL.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mayrowani, dkk (1998) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi peminjam dalam mengembalikan kredit adalah *monitoring* yang dilakukan petugas, kemudian peminjam dalam mengakses kredit, ketepatan waktu penyaluran, bentuk dan cara penagihan, pemahaman peminjam dan mengelola kredit, dan kemampuan manajerial kelompok.

Dalam hal kredit ini, si penerima kredit menerima benda atau uang tunai pada waktu diperlukan, sedangkan imbalannya ditanggihkan pada waktu yang lain dikemudian hari yang sesuai dengan kesanggupan si penerima dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penanggihan didasarkan pada kepercayaan pada pihak pemberi terhadap penerima, kepercayaan ini didasarkan pada (1) nama baik si penerima, (2) harta si penerima, (3) keadaan perusahaan, (4) kepandaian sebagai pengusaha, (5) kejujuran (Adiwilaga, 1974).

Sejak tahun 1969 memang sudah dimulai dengan pemberian kredit kepada petani atas jaminan tanaman, tapi perkembangan kredit tidak memuaskan. Petani belum bisa dan tidak memandang kewajiban-kewajiban terhadap pemberi kredit secara serius akibatnya terlalu banyak tunggakan. Salah satu penyebab utama dari perkemabangan demikian harus dicari bidang lain, dalam hal ini peminjam mempunyai pandangan yang statis, sedangkan pinjaman produksi merupakan suatu hal yang dinamis. Hanya apabila peminjam punya pandangan hidup yang

dianamis pula, barulah ia akan menangkap makna dan nilai sebenarnya daripada perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan baik, karena meminjamkan kepada petani dan orang-orang kecil mempunyai banyak resiko, biasanya bunga yang diminta selalu tinggi (Adiwilaga, 1974).

Menurut Mubyarto (1977) bahwa Sudjana telah melakukan penelitian yang mendalam mengenai kredit kepada petani padi dan memberikan kesimpulan sebagai berikut : (1) pemberian kredit usaha tani dengan biaya yang ringan perlu untuk memungkinkan petani melakukan inovasi-inovasi dalam usahanya, (2) kredit itu harus bersifat kredit dinamis, yaitu mendorong seseorang untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti, (3) kredit yang diberikan selain merupakan perangsang untuk menerima petunjuk-petunjuk untuk bersedia berpartisipasi dalam program peningkatan produksi, (4) kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada kredit usaha tani yang langsung diberikan bagi produksi pertanian, tetapi pula harus mencakup kredit-kredit untuk keperluan rumah tangga (konsumsi). Menurut Mosher (1987) bahwa masalah peminjam sehubungan dengan kredit produksi diantaranya adalah : (1) menaksir besarnya yang akan diperolehnya, (2) menaksir berapa harga pasar, (3) biaya kredit, (4) sanksi kalau tidak melunasi pinjaman.

2.10 Evaluasi Program

Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap relevansi, prestasi, efisiensi, dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang disepakati. Evaluasi biasanya menyangkut perbandingan-perbandingan yang memerlukan informasi dari luar proyek tentang waktu, kawasan, atau populasi. Evaluasi menuntut suatu analisis yang sistematis, objek terhadap prestasi, efisiensi dan dampak proyek dalam kaitannya dengan tujuan-tujuannya. Tujuan utama adalah bukan untuk menjatuhkan suatu keputusan tetapi untuk menarik pelajaran dari pengalaman agar supaya menyesuaikan strategi campur tangan proyek yang ada, mengubah proyek-proyek lain yang sedang berjalan, atau untuk memperbaiki rancangan proyek-proyek baru dimasa yang akan datang (Casley, 1991). evaluasi merupakan suatu cara untuk belajar dari upaya-upaya pembangunan guna memperbaiki proses pembangunan, evaluasi mencoba untuk :

1. Secara kritis menguji kembali, dilihat dari sudut pembangunan berikutnya, rasional proyek yang dinyatakan dalam dokumen persiapan dan penilaian.
2. Menentukan memadainya proyek untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi pada pertanian dan pembangunan pedesaan dan untuk mempromosikan perubahan-perubahan yang diinginkan.
3. Membandingkan hasil-hasil nyata yang dicapai dengan target yang telah ditentukan dan mengidentifikasi alasan-alasan terjadinya kekurangan atau kelebihan.
4. Menilai efisiensi proyek.
5. Menentukan pengaruh dan dampak proyek.
6. Menyajikan pelajaran berharga dan rekomendasi yang diambil dari pelajaran tersebut.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu membahas program-program pemberdayaan menanggulangi masalah kemiskinan antara lain: Menurut Tim Peneliti BALITBANG (2006) untuk mempercepat keberhasilan program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I) dibutuhkan pendekatan model komunikasi persuasif dari pihak pemerintah, sehingga masyarakat pedesaan memahami program tersebut. K2I ini yang terjun langsung adalah pemerintah pusat tidak mengikutsertakan institusi lokal dalam pelaksanaannya sehingga pendekatan yang dilakukan kurang efektif karena masyarakat miskin belum mengenal orang-orang yang akan membantu mereka memecahkan masalah. Sedangkan penelitian ini akan membahas program KMN yang mana memanfaatkan institusi lokal sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat nagari.

Berbeda lagi dengan penelitian Edison Ahmad *cit* Helmi (2006) dengan judul Strategi Bertahan Keluarga Miskin, dari hasil penelitian Helmi untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan jalan kursus dan pelatihan serta perbaikan terutama jalan untuk perluasan pemasaran hasil pertanian sehingga mudah dijangkau dengan menjual produksinya untuk meningkatkan kesejahteraan yang ditujukan bagi seluruh keluarga miskin. Sedangkan dengan penelitian ini

penelitian ingin melihat apa saja strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program KMN, sehingga melalui program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menyediakan bantuan modal usaha bergulir yang hanya ditujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro dengan harapan masyarakat yang memiliki usaha mikro tersebut telah mengetahui bagaimana prospek usahanya kedepan. Sehingga tidak ada lagi kegiatan pelatihan yang diberikan karena masyarakat yang memiliki usaha mikro tersebut dianggap telah mengetahui bagaimana menjalankan usaha yang telah bertahun-tahun digelutinya.

Hasil penelitian Nelvi (2007) strategi pengentasan kemiskinan melalui program P2FM, setelah diteliti ternyata ada yang berdampak negatif oleh masyarakat. Dampak negatif disebabkan karena program tersebut tidak kondusif terhadap sebagian masyarakat penerima bantuan (nelayan dan masyarakat pesisir) karena tidak partisipatif, tidak transparatif, kurang terjalin komunikasi hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya tidak melibatkan keluarga miskin untuk merumuskan kebutuhan mereka. Sedangkan penelitian ini peneliti ingin melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KMN dalam mengentaskan kemiskinan yang notabene bersifat *as-lokal as-possible (bootoom-up)*.

Selanjutnya hasil penelitian Sri Munarti yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembalian dana Hibah Konservasi ke Kas Desa adalah persepsi responden terhadap dana HKD, berdasarkan jenis kegiatan, pengembalian dana berdasarkan status sosial dimasyarakat, dan berdasarkan tingkat keuntungan, sedangkan penelitian ini akan dilihat masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program KMN, dimana masalah yang banyak terjadi pada saat pengembalian kredit yang dilihat dari proses pelaksanaan program mulai dari identifikasi penerima hingga pelaporan.

Hasil penelitian Weni Zetrika (2008), Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari, setelah diteliti ada beberapa hal dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program KMN. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Inya (2009) Evaluasi program KMN juga

memiliki masalah dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis mulai dari sosialisasi sampai pada pelaporan. Sedangkan penelitian ini akan dilihat masalah yang terjadi saat pengembalian kredit dan faktor yang menyebabkan macetnya pengembalian KMN tersebut yang dilihat dari proses pelaksanaan program hingga pelaporan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Kecamatan Rao Selatan tepatnya di Nagari Lansek Kadok. Nagari ini dipilih secara sengaja (*purposive*). Karena setelah dilakukan survey kelapangan, Nagari Lansek Kadok merupakan salah satu nagari yang mendapatkan dana KMN dari 12 nagari di Kabupaten Pasaman (lampiran 3), dan Nagari Lansek Kadok ini mempunyai masalah dalam pengembalian dana KMN, masalah tersebut terlihat dari macetnya cicilan yang dilakukan penerima dana KMN tersebut (lampiran 7), sehingga Nagari Lansek Kadok merupakan Nagari dengan tunggakan tertinggi dalam pengembalian dana KMN dibandingkan dengan nagari-nagari yang lain (lampiran 5). Penelitian ini telah terlaksana pada bulan Juni s/d Juli 2011.

3.2 Metode dan Teknik Pengambilan Sampel

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (*case study*) yaitu tentang pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok untuk menelaah kemacetan dalam pengembalian, dan untuk mengetahui faktor kemacetan tersebut di tingkat rumah tangga miskin dilakukan survei terhadap rumah tangga miskin atau individu penerima kredit. Metode studi kasus yaitu penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Studi kasus ditujukan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003).

Teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan adalah *simple random sampling*. Populasi penerima Program KMN untuk tahap I berjumlah 10 kelompok (lampiran 4) yang berjumlah 82 orang dan 10 kelompok untuk tahap II, dan yang dijadikan populasi penelitian ini adalah kelompok penerima KMN tahap I saja, karena batas waktu pembayaran cicilan penerima dana KMN tahap I telah

selesai sampai September 2010. Program KMN anggaran 2007 merupakan program bantuan modal bergulir pertama kali di Nagari Lansek Kadok yang di implementasikan pada 2008.

Menurut Surachman (1982) penentuan jumlah sampel, jika populasi kurang dari 100 diambil sebanyak 50%, apabila populasi antara 100 - 1000 diambil sebanyak 15 - 50% dan apabila lebih dari 1000 maka diambil sebanyak 10 - 15%. Banyaknya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 responden berdasarkan jenis usahanya (lampiran 9). Penerima kredit tahap I terdiri dari 4 jenis usaha, dan ke 4 jenis usaha tersebut dilakukan pengambilan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi keseluruhan karena sub populasi yang tidak sama jumlahnya penarikan sampel dilakukan dengan perbandingan antar sub populasi sehingga didapatkan sampel proporsional (Nawawi, 1991).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara kepada sampel masyarakat penerima KMN dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan dan wawancara dengan informan kunci yang terdiri dari tim pelaksana program (pokja), wali nagari dan perangkat nagari, yang diyakini mampu memberikan informasi tentang program KMN.

2 . Data Sekunder

Diperoleh dari data yang tersedia di instansi-instansi terkait yaitu di Kantor Wali Nagari, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), kantor Camat Langsek Kadok dan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

3.4 Variabel Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Kredit Mikro Nagari (KMN) yang diamati adalah :

1. Persiapan

- Penetapan nagari penerima kredit mikro
- Pembentukan tim teknis
- Koordinasi program
- Sosialisasi program Kredit Mikro di Nagari

2. Perencanaan

- Identifikasi penerima bantuan
- Penyusunan prioritas usulan jenis usaha
- Kesepakatan aturan modal bergulir
- Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis
- Penjaringan calon penerima dana KMN

3. Pelaksanaan

- Penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana
- Proses pencairan dana KMN
- Prosedur pengembalian dana

4. Pengawasan

- Kegiatan yang dilakukan tim POKJA dalam rangka kontrol terhadap pemanfaatan dan perkembangan kredit oleh masyarakat penerima KMN.

5. Pelaporan

- Proses pelaporan.....(Juknis Program KMN 2008).

2. Mendeskripsikan karakteristik pengguna dana Kredit Mikro Nagari (KMN), data yang diamati adalah :

1. Karakteristik personal

- Jenis kelamin
- Usia
- Tingkat pendidikan
- Jumlah tanggungan keluarga

2. Karakteristik usaha

- Pengalaman berusaha
- Total pendapatan usaha

3. Karakteristik kredit

- Jumlah pinjaman
- Pengalaman kredit

3.5 Analisa Data

Dari data primer dan data sekunder dikumpulkan di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Menurut Meleong (2003), analisa deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian. Hal ini dijelaskan masalah sebagai fokus studi penelitian, mengumpulkan data dilapangan, menganalisa data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk penyajian sasaran mencapai tujuan tersebut yaitu dengan membuat gambaran deskripsi dari variabel-variabel yang sistematis.

Untuk dapat mencapai tujuan pertama, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Lansek Kadok dilakukan analisa deskriptif kualitatif, ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan, proses pemberian kredit mikro di Nagari Lansek Kadok.

Untuk tujuan kedua, yaitu mendeskripsikan karakteristik pengguna dana KMN di Nagari Lansek Kadok dianalisa secara kualitatif dengan wawancara secara mendalam kepada responden.

3.6 Defenisi Operasional

1. Evaluasi adalah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
2. Evaluasi program adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program yang nantinya hasil dari evaluasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan (*Decision maker*) dalam mengambil keputusan apakah program tersebut sudah tepat dan masih pantas untuk

dilanjutkan atau masih kurang, sehingga perlu adanya revisi, atau bahkan dihentikan.

3. Evaluasi program KMN adalah proses keberhasilan suatu program yang telah direncanakan dalam tercapainya tujuan apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Pembentukan pokja (kelompok kerja) adalah kelompok yang akan melaksanakan dan menjalankan program KMN di nagari.
5. Kredit adalah kepercayaan atau penyediaan uang atau pinjaman sampai batas tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah, bank atau badan lainnya.
6. Kriteria penerima kredit, kriteria jenis usaha dalam perguliran dana adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam penetapan kelompok atau individu sebagai penerima kredit mikro.
7. Koordinasi program adalah sinkronisasi kegiatan untuk semua sektor/tingkatan (propinsi, kabupaten kecamatan, nagari, pokja).
8. Sosialisasi adalah door to door yaitu tahap sosialisasi yang dilakukan dari rumah ke rumah masyarakat, tujuannya agar informasi bisa langsung tertuju pada sasaran.
9. Penilaian kelayakan usaha : *prochecking* yaitu penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh kelompok kerja (POKJA) secara acak.
10. Penetapan penerima kredit adalah penjangkaran calon penerima dana KMN yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
11. Proses pencairan dana adalah proses penyaluran dana kepada penerima kredit.
12. Pengawasan adalah adalah systeminformasi yang memonitor rencana dan proses untuk meyakinkan bahwa rencana selaras dengan tujuan yng telah ditetapkan.
13. Jenis kelamin yaitu jenis kelamin dari penerima KMN.
14. Usia yaitu umur penerima dana sejak lahir hingga proses pengambilan data dilakukan (tahun).
15. Tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal yang dijalani oleh penerima dana KMN dihitung dalam satuan tahun.
16. Jumlah tanggungan keluarga adalah anak dari penerima dana yang belum menikah dan/atau dalam usia sekolah dan/atau anggota keluarga yang

berpenghasilan atau jumlah anggota yang masih bergantung pada penerima dana dalam hal ini keuangan dihitung dalam satuan orang.

17. Pengalaman usaha yaitu lama usaha yang digeluti penerima, dihitung dalam satuan tahun.
18. Total pendapatan usaha yaitu jumlah penerima bersih rata-rata perbulan dari hasil usaha penerima.
19. Jumlah pinjaman yaitu nilai nominal pinjaman kredit yang diterima peminjam.
20. Pengalaman kredit yaitu berapa kali debitur telah memperoleh pinjaman.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Nagari Lansek Kadok yang terletak di kecamatan Rao Selatan dengan luas wilayah 33.898 Ha atau 338,98 km² dengan ketinggian 252-1.100 m dari permukaan laut. luas daerah Nagari Lansek Kadok 13.425 Ha atau 134,25 km² berbatas dengan :

1. Sebelah Utara dengan Nagari Lubuk Layang
2. Sebelah Selatan dengan Nagari Tanjung Betung
3. Sebelah Barat dengan Nagari Tarung-Tarung
4. Sebelah Timur dengan Nagari Muaro Tais

Nagari Lansek Kadok terbagi atas 5 (lima) jorong antara lain : Lansek Kadok, Koto Panjang, Rambah, Beringin, Kotanopan Setia. Secara terperinci Nagari Lansek Kadok berada pada jalur lalu lintas dengan ibu kota Kabupaten Lubuk Sikaping dengan jarak tempuh \pm 53 km. Secara terperinci Nagari Lansek Kadok mempunyai jarak tempuh ke beberapa daerah sekitarnya sebagai berikut : (a) waktu tempuh ke ibu kota provinsi \pm 7 jam, (b) waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten \pm 2 jam, serta (c) waktu tempuh ke ibu kota kecamatan 0,75 jam.

4.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi yang bervariasi antara dataran dan perbukitan serta iklim yang mendukung sangat berpotensi untuk pertanian dan perikanan. Hal ini terlihat pada penggunaan lahan terbesar di Nagari Lansek Kadok adalah untuk kolam ikan dan persawahan. Secara terperinci data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Alam Nagari Lansek Kadok

No	Potensi Umum	Keterangan (Ha)
1.	Tanah sawah	2.331
2.	Tanah kering	12.210
3.	Tegal/ ladang /kebun	1.560
4.	Pemukiman	11.347
5.	Kolam ikan	2.114
6.	Lain-lain	569

Sumber : gambaran umum Nagari Lansek Kadok 2008

4.1.3 Sumber Daya Manusia

Nagari Lansek Kadok pada tahun 2007 memiliki penduduk sebanyak 23.662 jiwa, terdiri dari 11.653 laki-laki dan 12.009 perempuan. Pada tahun 2008 terjadi penambahan penduduk menjadi 23.824 jiwa. Dari keseluruhan penduduk laki-laki meningkat sebesar 79 jiwa, perempuan meningkat sebesar 82 jiwa. Penggolongan penduduk Nagari Lansek Kadok berdasarkan umur pada tahun 2007 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO.	UMUR	JUMLAH (jiwa)	
		2007	2008
1.	0 – 12 bulan	242	275
2.	1 – 5 bulan	736	951
3.	5 – 6 bulan	373	414
4.	7 – 15 bulan	1.154	1.213
5.	16 – 21 tahun	1.144	1.260
6.	22 – 59 tahun	4.651	4.857
7.	> 60 tahun	1.048	1.186
	Jumlah	9.348	10.156

Sumber : Profil Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan 2008

Dilihat dari Tabel diatas perbandingan jumlah penduduk Nagari Lansek Kadok tahun 2006 dan 2007 menurut kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbanyak pada kisaran umur produktif, yakni antara umur 22 – 59 tahun yang jumlahnya mencapai 4.857 jiwa pada tahun 2007. Ini membawa konsekuensi pada tersedianya sumber daya tenaga kerja yang memadai tingkat nagari karena jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur produktif. Hal ini tentu saja harus antipasi oleh aparat nagari dengan menyediakan lapangan kerja

serta berbagai peluang lainnya agar potensi SDM meningkat dan angka pengangguran terkendali.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Nagari Lansek Kadok secara kuantitas sudah cukup memadai dan sangat membantu dalam menggerakkan pembangunan masyarakat di nagari. Sarana dan prasarana yang terdapat di nagari, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana di Nagari Lansek Kadok

NO.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah (satuan)
1.	Prasarana dan sarana transportasi A. Jalan Desa (km) a. Panjang jalan aspal b. Panjang jalan tanah B. Jalan antar desa/ kecamatan (km) a. Panjang jalan aspal C. Jembatan desa (unit) a. Jumlah jembatan beton b. Jumlah jembatan kayu D. Jembatan antar desa/kecamatan a. Jumlah jembatan beton (unit) E. Sarana transportasi (unit) a. Pangkalan ojek	 10,5 5,3 10,5 5 4 2 2
2.	Prasarana komunikasi (unit) a. Wartel b. TV c. Parabola	 2 1975 513
3.	Prasarana air bersih (unit) a. Jumlah sumur gali b. Jumlah mata air c. Jumlah MCK	 339 17 25
4.	Prasarana pemerintahan (unit) a. Jumlah mesin tik b. jumlah computer c. Jumlah meja d. Jumlah kursi e. Jumlah almari arsip	 2 1 9 32 6
5.	Prasarana peribadatan (bh) a. Mesjid b. Langgar/surau/musholla	 19 12

6.	Prasarana olah raga (unit)	1
	a. Lapangan sepak bola	1
	b. Lapangan bulu tangkis	7
	c. Lapangan Voli	1
	d. Lapangan takraw	8
	e. Lapangan meja pimpong	
7.	Prasarana kesehatan (unit)	
	a. Puskesmas	1
	b. Posyandu	15
	c. Toko obat	2
	d. Tempat dokter praktek	1
8.	Sarana kesehatan (orang)	
	a. Jumlah dokter umum	3
	b. Bidan desa	4
	c. Dukun terlatih	2
9.	Prasarana pendidikan (bh)	
	a. SLTA/ sederajat	1
	b. SLTP/ sederajat	1
	c. SD/ sederajat	15
	d. TK	5
	e. MDA	5
	f. TPA	14

Sumber : Daftar isian potensi Nagari Lansek Kadok, 2008

4.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi dan Keadaan Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai hidup. Tingkat kemiskinan masyarakat di Nagari Lansek Kadok tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Nagari Lansek Kadok yang cukup padat. Jumlah kasar penduduk di Nagari Lansek Kadok terhitung sampai tahun 2009 ± 13.000 jiwa atau 1536 KK dan jumlah KK miskin di Nagari Lansek Kadok yang tercatat sebagai penerima BLT yaitu berjumlah 943 KK atau 23,3% dari jumlah KK yang ada di Nagari Lansek Kadok. Berdasarkan informasi diatas, terlihat bahwa Nagari Lansek kadok bukan nagari yang memiliki angka kemiskinan tinggi.

Berdasarkan informasi dengan aparat nagari, profil keluarga miskin yang ada di Nagari Lansek Kadok dicirikan oleh kondisi sebagaimana yang tercantum dalam profil rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS antara lain menetapkan ukuran garis kemiskinan dengan menghitung komponen untuk makanan/pangan sebesar 2.100 kalori/hari/kepala dan komponen non makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, trnsportasi, dll), sehingga secara kuantitatif

rumah tangga miskin menurut BPS memenuhi kriteria 1.900 – 2.100 kalori/orang/hari + Rp. 120.000/bulan. Secara terperinci populasi KK miskin perjorong di Nagari Lansek Kadok dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sebaran Penduduk Miskin Berdasarkan Jorong di Nagari Lansek Kadok

NO.	Nama Jorong	Jumlah (KK)
1.	Lansek Kadok	98
2.	Koto Panjang	76
3.	Rambah	127
4.	Beringin	122
5.	Koto Nopan	75
	Jumlah	498

Sumber : Wali Nagari Lansek Kadok 2008

4.2 Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN)

Program KMN merupakan program yang dirancang untuk mengikuti arahan kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGS)*. KMN adalah program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari pemerintah propinsi ke kabupaten selanjutnya disosialisasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan diteruskan ke nagari dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di nagari.

Program KMN pada intinya merupakan program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk memberikan stimulasi modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat nagari agar mampu berkembang dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatannya dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan. Untuk memperlancar implementasi program ini, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (selanjutnya akan disingkat dengan TKPK) Kabupaten Pasaman memberikan dana operasional kepada pokja nagari sejumlah 3.000.000 rupiah. Berdasarkan temuan dilapangan, dana ini dibagi realisasinya untuk honor pokja, honor wali nagari dan operasional kegiatan (konsumsi rapat, ATK dll). Hal ini tidak sesuai dengan yang tertera dengan petunjuk teknis (juknis) program KMN bahwa dana operasional pokja berjumlah

Rp. 7.600.000. dari wawancara dengan wali nagari yang sekaligus menjabat sebagai kepala bidang perencanaan pada pokja KMN, mengenai honor ini telah diurus oleh kabupaten, namun pihak dari kabupaten menyatakan bahwa anggaran untuk dana operasional program KMN sudah habis, oleh karena itu kekurangan dana operasional dalam pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok di subsidi oleh pemerintah nagari.

Dengan merujuk pada petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Kredit Mikro Nagari, maka implementasi program KMN di Nagari Lansek Kadok terdiri dari beberapa bagian yaitu persiapan, perencanaan, penyaluran, pencairan dana dan pengawasan serta pelaporan.

4.2.1 Identitas Responden Penerima Dana KMN Tahun 2008

Umur responden penerima dana KMN di Nagari Lansek Kadok terbesar pada kelompok umur 41 – 50 tahun jumlahnya 19 orang (46,4%). Umur responden penerima dana KMN terkecil berada pada umur > 50 tahun yaitu jumlahnya 4 orang (9,8%), tidak jauh berbeda dengan jumlah penerima dana KMN yang berumur 21-40 tahun berjumlah 18 orang (43,8%). Tingkat pendidikan responden umumnya SLTA 20 orang (48,8%), namun tidak berbeda jauh dengan jumlah penerima dana KMN yang pendidikannya setingkat SLTP dan SD yaitu berjumlah 18 orang (33,9%). Pengalaman berusaha responden lebih banyak antara > 6 tahun yaitu 15 orang (36,6%). sedangkan yang pengalamannya 1-3 tahun yaitu 12 orang (29,3%).

Jenis usaha yang dijalankan masyarakat penerima dana KMN yang menjadi sampel penelitian ini cukup beragam , yaitu padi sawah 15 orang, kolam ikan 12 orang, ternak itik 8 orang, dan warung kelontong 6 orang (Lampiran 9). Uraian mengenai identitas responden dapat di lihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Identitas Responden Penerima Program KMN Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah (Orang)	% Jumlah
1.	Umur responden		
	21-40	18	43,8
	41-50	19	46,4
	>50	4	9,8
2	Pendidikan		
	Tamat SD	8	19,8
	Tamat SLTP	10	24,4
	Tamat SLTA	20	48,8
	Tamat D III	3	7,3
3.	Pengalaman berusaha (tahun)		
	<1	5	12,3
	1-3	12	29,3
	4-6	9	21,9
	>6	15	36,6
4.	Kedudukan di masyarakat		
	Tokoh masyarakat/aparat nagari	3	7,3
	Mempunyai hubungan dengan aparat nagari	20	48,8
	Masyarakat biasa	18	43,8

Sumber : Data Olahan, 2011

Dari Tabel 5 di atas, terlihat bahwa pendidikan di Nagari Lansek Kadok cukup tinggi, banyak responden yang mempunyai pendidikan tamat SLTA dan SLTP serta D III. Hal ini didukung dengan lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Lansek Kadok seperti yang terlihat pada Tabel 3. Pelaksanaan program KMN terdiri dari beberapa bagian yaitu Persiapan, Perencanaan, Penyaluran dan pencairan dana, Pengawasan serta Pelaporan. Berikut akan dipaparkan mengenai persiapan program KMN.

4.2.2 Persiapan

Pada tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan yaitu penetapan nagari penerima dan KMN dan sosialisasi program KMN. Kegiatan dalam tahap persiapan dilihat uraian berikut :

4.2.2.1 Penetapan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari

Berdasarkan hasil wawancara dengan pokja, didapatkan informasi bahwa Nagari Lansek Kadok terpilih sebagai nagari penerima program KMN secara acak. Wali nagari dan pokja tidak terlalu mengetahui indikator penetapan nagari

penerima dana KMN dari kabupaten. Jika dilihat dari angka kemiskinannya, Nagari Lansek Kadok tidak memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Pada juknis KMN 2008 telah dipaparkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam penetapan nagari penerima program KMN, yaitu berdasarkan proporsi atau jumlah RTM (KK) yang ditetapkan BPS, bukan nagari dalam konflik internal, mempunyai resiko tinggi dalam hal perbankan. Hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa Nagari Lansek Kadok telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Setelah ditetapkan Nagari Lansek Kadok sebagai salah satu nagari penerima program KMN pada tahun 2008, maka kewajiban pemerintah nagari dan pokja untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat agar dana KMN ini tepat sasaran.

4.2.2.2 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kelompok kerja di Nagari Lansek Kadok dibentuk pada tanggal 18 September 2008, pokja yang dibentuk pada tingkat nagari adalah tim yang akan melaksanakan dan menjalankan proses pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Pokja program ini adalah tokoh masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dalam musyawarah nagari tujuannya agar pokja yang dibentuk ini dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik untuk membangun masyarakat nagari. Yang ditetapkan dengan keputusan wali nagari, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. Pembentukan pokja ini sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program KMN.

Tugas-tugas pokok dan fungsi pokja nagari adalah :

- a. Memperluas informasi tentang kegiatan program KMN kepada masyarakat di jorong-jorong dalam Nagari.
- b. Menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima KMN dari masyarakat/kelompok.
- c. Memverifikasikan usulan yang telah masuk dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Kesanggupan pengembalian kredit.
 - Kewajaran pinjaman dengan usaha yang akan dilakukan.
 - Belum cacat dalam masalah utang-piutang.
 - Tidak terkait dalam masalah pinjaman dengan lembaga lain.
 - Memeriksa calon peminfaat dalam masalah utang-piutang.
- d. Mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga Nagari dan masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima KMN.
- e. Melakukan pemantuan, pembinaan dan pengawasan peminfaat dana oleh kelompok masyarakat.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pencairan dana serta perkembangan KMN setiap bulan pada minggu pertama kepada Wali nagari.

Wali jorong juga melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan kesiapan calon penerima bantuan dalam pengembalian pinjaman nantinya yang hasilnya dilaporkan kepada pokja. Kunjungan lapangan dilakukan sebelum diberikan dana pinjaman, selanjutnya pokja ini juga melakukan pembinaan untuk usaha masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok yang dijalankan masyarakat. Pembentukan pokja ini sesuai dengan rencana awal tidak mengalami keterlambatan seiring dengan perencanaan akan diadakannya program KMN. Tugas ini sudah dimulai sejak 25 Desember 2008 yang di sah kan oleh Walinagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Walinagari, di Nagari Lansek Kadok pembentukan pokja dilakukan dengan cara ditunjuk oleh masyarakat secara langsung dalam musyawarah nagari pada tanggal 18 September 2008 yang di sah kan oleh Walinagari. Tim teknis ini terdiri dari ketua Badan Musyawarah Nagari (BMN) sebagai ketua kelompok kerja program KMN, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada bagian fungsi perencanaan, ketua PKK sebagai fungsi keuangan, Sekretaris Walinagari fungsi pelaporan, dan untuk fungsi pengawasan semua pihak yang terkait yang dibantu oleh Wali jorong yang berjumlah 5 orang untuk memantau masyarakat penerima Program KMN di tiap-tiap jorong. Masyarakat menunjuk orang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan nagari ataupun instansi karena masyarakat Nagari Lansek Kadok menganggap orang-orang ini telah terbiasa berurusan dengan pemerintahan dan birokrasi yang

ada.berbagai jabatan pimpinan dalam struktur kepengurusan dengan birokrasi yang rumit. berbagai jabatan pimpinan dalam sruktur kepegurusan yang berbeda dipegang oleh orang yang sama, maka hasil kerjanya tidak akan optimal dan efektif, karena pimpinan mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Menurut Hasibuan (2001), pimpinan mempunyai keterbatasan diantaranya adalah keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian dan seorang memegang pimpinan dibeberapa struktur organisasi akan bekerja kurang efektif.

Sejalan dengan pendapat diatas setelah dilakukan penelitian tugas-tugas pokja dan fungsi pokja ini tidak dijalankan sebagai mana mestinya oleh pokja, sebagian tugas pokja dilakukan oleh wali jorong, dalam hal ini pokja hanya membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pencairan dana kepada TKPK Kabupaten Pasaman, dan pokja hanya menerima laporan dari wali jorong mengea data masyarakat calon penerima dana KMN dan membahasnya pada musyawarah nagari, karena tidak sesuainya tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh pokja menyebabkan pokja tidak begitu dekat dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat tidak merasa ada ikatan emosional dengan pokja yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas program KMN.

4.2.2.3 Koordinasi Program

Koordinasi program dilaksanakan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat nagari. Kegiatan kooordinasi telah dilaksanakan antara TKPK Kabupaten dengan Wali Nagari dan pokja pada tanggal 8 Oktober 2008 yang telah terbentuk di 12 nagari yang diadakan di Gedung Syamsiar Taib Kabupaten Pasaman. Kegiatan yang diikuti oleh camat masing-masing daerah, wali nagari dan pokja. Kegiatan ini hanya dihadiri oleh aparat kabupaten dan tidak dihadiri oleh aparat propinsi (TKPK propinsi) yang terkait dengan program KMN hal ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang mana pada kegiatan koordinasi harus dihadiri oleh TKPK propinsi.

Rapat koordinasi dilaksanakan selama satu hari penuh. Sumber biaya dari pembekalan program KMN tahun 2008 ini berasal dari APBD Kabupaten Pasaman. Peserta rapat adalah ketua pokja masing-masing nagari yang menerima bantuan dana bergulir KMN, wali nagari, dan camat masing-masing daerah, dan

dihadiri juga oleh Dinas Sosial, BPM, Sekda, BAPEDA. Dalam penyajian materi pembekalan narasumber berasal dari : BPM, Sekda, BAPEDA. Panitia penyelenggara pembekalan ini berasal dari unsur staf BPM Kabupaten Pasaman berdasarkan keputusan Bupati Pasaman.

Setelah dilakukan rapat koordinasi selanjutnya dilakukan pertemuan terhadap TKPK propinsi yang dilaksanakan selama dua hari di Padang dimulai tanggal 12 November 2008 adapun kegiatannya adalah penerimaan peserta sekaligus pembukaan kegiatan dan berakhir tanggal 13 November 2008 sekaligus penutupan, kegiatan ini bertempat di Pusdiklat Bhakti Bunda jl. Asahan No. 2 Komplek Gor H. Agus Salim Padang Baru-Padang. pertemuannya adalah perihal Desiminasi bagi Walinagari dan ketua pokja penerima bantuan KMN. Materi yang disampaikan antara lain sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan KMN yang disampaikan oleh Bapedda, selanjutnya materi yang disampaikan adalah mekanisme penyaluran KMN yang disampaikan oleh Biro Keuangan dan terakhir materi yang disampaikan mengenai pendampingan dan pengorganisasian dalam penyaluran kredit yang disampaikan oleh BPM. kegiatan ini dihadiri oleh Ka. BPM, Bapedda, BPM, Dinas Sosial, peserta terdiri dari wali nagari dan ketua pokja masing-masing nagari yang memperoleh bantuan dana KMN dengan sumber dana berasal dari APBD I.

Tugas-tugas pokok dan fungsi tim koordinasi kabupaten adalah :

- a. Menyusun petunjuk teknis lingkup kegiatan di kabupaten masing-masing.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan TKPK propinsi.
- c. Menyebarkan informasi tentang program KMN kepada nagari-nagari, di wilayah kabupaten.
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada pokja nagari.
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pada saat pelaksanaan di Nagari.
- f. Melaksanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan di Wilayah Kabupaten.
- g. Merekapitulasi laporan-laporan tersebut setiap bulannya dan kirimkan ke TKPK propinsi.
- h. Menerima surat-surat pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan program.

teknis pelaksanaan program yaitu kegiatan sosialisasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kesesuaian Persiapan Program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan Juknis

Kegiatan	Juknis	Di lapangan	Keterangan
Koordinasi Program	Melakukan rapat	Melakukan rapat	Tidak sesuai karena tidak dihadiri oleh pemerintah propinsi
Materi acara	Mengenai penjelasan teknis/tata cara penyaluran bantuan KMN	Mengenai penjelasan teknis/tata cara penyaluran dana KMN	
Peserta	Pokja, camat dan TKPK tingkat kabupaten selaku lembaga teknis KMN yang dihadiri semua sektor (propinsi, kabupaten, kecamatan, nagari).	Hanya dihadiri oleh kabupaten, kecamatan, dana nagari.	Tidak sesuai karena pada sosialisasi dilakukan <i>door to door</i> , takutnya semua masyarakat menuntut untuk mendapatkan pinjaman kredit, seharusnya pertemuan dilakukan secara terbuka.
Sosialisasi Program KMN	Pertemuan kelompok masyarakat di jorong	Sosialisasi dilakukan oleh pokja dari rumah ke rumah (<i>door to door</i>)	
Materi acara	Tata cara pelaksanaan program KMN		
Peserta	Wali jorong, tokoh masyarakat, ninik mamak, pemeritah nagari, semua masyarakat miskin yang telah di data oleh pokja.		

Dari Tabel 6 diatas dapat dilihat adanya beberapa perbedaan kegiatan persiapan program KMN dilapangan dengan yang ada pada juknis. Pada kegiatan sosialisasi program dikantor wali nagari harusnya masyarakat telah terbentuk dalam kelompok usaha, namun realisasi dilapangan tidak demikian. Wali jorong mengatakan masyarakat memang tidak dibentuk dalam kelompok usaha, jadi dana dikelola oleh masing-masing individu saja yang sekaligus bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman. Hal ini dikareakan jenis usaha masyarakat bervariasi dan jika dibentuk dalam kelomok usaha ditakutkan ketidakcocokan dalam kelompok tersebut. jadi pengelompokan hanya terjorong saja, tapi hal

tersebut hanya formalitas, pengelolaan dana serta pertanggung jawabnya tetap masing-masing individu. Setelah tahap persiapan selesai selanjutnya tahap perencanaan.

4.2.3 Perencanaan

Pada tahap perencanaan terdapat beberapa kegiatan, yaitu identifikasi penerima dana KMN, penyusunan prioritas, membuat kesepakatan aturan modal bergulir, penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis, serta penetapan penerima dana KMN.

4.2.3.1 Identifikasi Penerima Dana KMN

Berdasarkan petunjuk teknis identifikasi ini dilakukan melalui Musbang Nagari secara demokratis dan terbuka kepada keluarga miskin sesuai data yang ditetapkan oleh BPS masyarakat yang berhak yakni sebanyak 82 orang dengan kriteria: Penduduk setempat yang tidak bermasalah dengan penggunaan dana dimasa lalu, mempunyai usaha kecil serta mempunyai prospek untuk perkembangannya, kelompok/individu kategori keluarga miskin yang memiliki kemampuan usaha sedangkan untuk pemula diharapkan bergabung dengan kelompok usaha sejenis, kelompok yang telah mendapatkan bantuan dari instansi lain tidak diprioritaskan menerima dana KMN, kelompok atau individu non KK miskin yang telah mempunyai usaha dan mempunyai kemauan bergabung atau bekerja sama dengan kelompok usaha KK miskin, persentase tertinggi masyarakat miskin.

Menurut pokja pendataan penduduk miskin masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Menurut ketua pokja pendataan penduduk miskin masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari banyaknya protes dan ketidakpuasan masyarakat terhadap data kemiskinan yang telah ada, banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa banyak diantara penduduk miskin yang bukan miskin dan sebaliknya, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial karena menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian bantuan. Di Nagari Lansek Kadok identifikasi calon penerima dana KMN ini dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk oleh wali nagari. Semua

masyarakat yang memiliki usaha mikro didata oleh wali jorong untuk diidentifikasi lebih lanjut, dimana proses identifikasi ini diadakan dengan kunjungan ke lokasi dan wawancara langsung kepada masyarakat oleh wali jorong.

Pada pelaksanaannya wali jorong mengidentifikasi masyarakat diorong masing-masing yang layak untuk dibantu dan diberi dana KMN serta memberikan laporan kepada pokja. Wali jorong diberi kewenangan untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria calon penerima KMN. Karena sosialisasi program KMN tidak luas, sehingga kesimpangsiuran informasi di masyarakatpun rentan terjadi. Dari hasil penelitian berdasarkan hasil identifikasi wali jorong untuk tahap awal terdapat 82 orang yang berhak menerima dana KMN yang tersebar di 5 jorong. Indikator untuk mengidentifikasi awal penerima dana KMN di Nagari Lansek Kadok dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kesesuaian Identifikasi Penerima Dana KMN di Nagari Lansek Kadok 2008

Kriteria Penerima	Juknis	Di lapangan	Keterangan
Identifikasi penerima dana	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang tidak bemasalah dengan dana bergulir dimasa lalu - Mempunyai usaha kecil dan prospek untuk perkembangannya - Kelompok tergabung dalam usaha yang sejenis - Persentase tertinggi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat penerima bantuan BLT - Memiliki usaha atau penghasilan - Kelompok tergabung dalam usaha yang berbeda-beda - Persentase tertinggi penduduk non miskin 	Tidak sesuai karena penerima dana KMN persentasi tertinggi adalah penduduk non miskin masyarakat penerima BLT dan kelompok usaha yang berbeda-beda

Sumber: POKJA, 2011

Indikator pada Tabel 7 diatas mengacu kepada indikator yang telah ditetapkan dalam juknis KMN 2008. Namun ada beberapa perbedaan antara kriteria yang ditentukan pokja dengan yang terdapat dalam juknis seperti ahli waris tidak diharuskan oleh juknis. Disamping itu, tanggapan anggota keluarga yang besar seperti yang terdapat dalam juknis tidak diharuskan dilapangan. Berdasarkan wawancara dengan pokja, perbedaan ini wajar karena aturan yang ada dalam juknis tersebut masih baku dan dapat dirubah di lapangan berdasarkan kondisi masing-masing nagari.

4.2.3.2 Penyusunan Prioritas

Setelah dilakukan identifikasi terhadap calon penerima program, tahap selanjutnya penyusunan prioritas. Kegiatan ini pada intinya memuat proses seleksi secara objektif dengan indikator tertentu secara transparan terhadap seluruh usulan jenis usaha dan kelompok individu calon penerima dana KMN. Temuan dilapangan secara umum memperlihatkan bahwa proses ini sudah berjalan, dimana proses ini dilaksanakan oleh pokja dan wali jorong. Dalam menyusun prioritas calon penerima dana KMN terdapat 7 poin yang menjadi acuan pokja, yaitu :

1. KK miskin 30 % dan non KK miskin 70%
2. Masyarakat yang memiliki usaha atau memiliki penghasilan
3. Memiliki kemauan dan kemampuan berusaha
4. Penduduk asli nagari
5. Dana diperuntukan bagi penambahan modal
6. Calon penerima yang tergolong KK miskin merupakan penerima BLT
7. Memiliki sifat jujur berdasarkan penilaian wali jorong dan aparat nagari

Terdapat perbedaan indikator penyusunan prioritas yang dilaksanakan nagari dengan prioritas yang ada dalam juknis, dimana prioritasnya adalah :

1. Masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro dan tergabung dalam kelompok usaha yang sudah ada dan terlembaga sebelum adanya program KMN;
2. Prioritas KK miskin 70% dan non KK miskin 30%;
3. Mempunyai tanggungan anggota keluarga yang banyak;
4. Memiliki kemauan dan kemampuan berusaha;
5. Penduduk asli nagari;
6. Dana diperuntukan bagi penambahan modal;
7. Diperuntukan bagi usaha yang cepat menghasilkan.

Perbedaan dalam penyusunan prioritas antara juknis dan dilapangan ini pada realitanya menimbulkan permasalahan dalam penentuan target penerima program KMN di Nagari Lansek Kadok. Berdasarkan hasil wawancara dengan

pokja prioritas pemberian dana tidak sesuai dengan petunjuk teknis. hal ini pokja sepakat memberikan dana KMN ini pada masyarakat non KK miskin 70 % dan KK miskin 30 % pokja berharap pengembalian dana berjalan lancar, namun realitanya dilapangan masih banyak penerima yang menunggak dalam pengembalian dana KMN ini.

Dari hasil penelitian berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat setempat yang tidak menerima pinjaman dana KMN di Nagari Lansek Kadok mengatakan bahwa masih ada wali jorong yang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang tidak memenuhi syarat menerima dana KMN namun tetap mendapatkannya, dimana pemerintah kabupaten mengatakan bahwa penerima dana KMN yang berasal dari KK miskin ini merupakan penerima BLT dulunya, karena penerima BLT ini telah diseleksi berdasarkan kriteria rumah tangga miskin dari BPS. Indikator kemiskinan dari BPS yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang;
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbio/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan;

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya (BPS Provinsi Sumatera Barat).

Namun pelaksanaan dilapangan, masyarakat yang mempunyai usaha mikro dan tergolong KK miskin tetap mendapatkan pinjaman dana KMN walaupun dulunya tidak terdaftar dalam penerima BLT, namun pokja melihat masyarakat tersebut mampu melunasi cicilan dan tidak bermasalah dengan pinjaman maka mereka bisa diberi pinjaman. Menurut pokja, aturan yang ditetapkan di tingkat kabupaten masih baku dan tidak semua nagari bisa mengaplikasikannya 100% sesuai dengan yang ditetapkan tersebut karena kondisi di tiap nagari berbeda-beda. Ketidakjelasan aturan dalam menilai kelayakan usaha dari pokja dan aparat nagari ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pinjaman dana KMN dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

4.2.3.3 Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Teknis

Dalam petunjuk teknis penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis merupakan suatu tahap yang harus dijalani bagi penerima program KMN untuk mengetahui layak atau tidaknya seseorang menerima dana KMN tersebut oleh pokja didampingi oleh tim koordinasi nagari untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pokja penilaian kelayakan usaha dilakukan oleh wali jorong dengan melakukan survei kelapangan, dan hasilnya dilaporkan kepada pokja. Dan selanjutnya hasil survei tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan persetujuan suatu usulan.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa penilaian kelayakan usaha ini belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan responden, hanya 10 orang responden yang menjawab dinilai kelayakan usahanya oleh wali jorong dan pokja secara langsung, sedangkan 23 orang menjawab tidak ada survei usaha yang dilakukan. Masyarakat yang usahanya di survei oleh wali jorong tidak mengetahui indikator usaha yang layak

untuk mendapatkan pinjaman dana KMN. Setelah diwawancara lebih lanjut, masyarakat yang tidak disurvei usahanya umumnya memiliki hubungan kekeluargaan atau sudah kenal dekat dengan wali jorong sehingga mereka menggunakan azas kepercayaan saja. Dalam pelaksanaan program KMN di lapangan hal ini menimbulkan masalah kredit macet karena ketidakjelasan usaha masyarakat penerima dana KMN.

4.2.3.4 Penetapan Penerima Kredit

Bedasarkan Juknis calon penerima bantuan kredit dan jenis usaha yang layak berdasarkan usulan walinagari kemudian diserahkan ke TKPK kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman, apabila sudah ditetapkan oleh Bupati, tim teknis akan menyuruh pokja nagari agar membuka rekening penyaluran dana kepada kelompok masyarakat melalui rekening pokja. Berdasarkan temuan dilapangan memperlihatkan pada tanggal 1 November 2008. Masyarakat yang diundang adalah masyarakat yang masuk dalam penjaringan calon penerima KMN. Dari hasil penelitian dalam proses penjaringan tersebut terbentuk 10 kelompok usaha dengan jumlah anggota secara keseluruhan adalah 82 orang untuk tahap satu (1) dan 76 orang untuk kelompok tunggu.

Penjaringan calon penerima KMN 2008 dilaksanakan di kantor wali nagari yang dihadiri oleh wali nagari, wali jorong dan pengurus pokja. Dimana masing-masing wali jorong membawa berkas nama-nama yang telah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nama-nama yang diusulkan cukup banyak, sehingga pokja mengambil kebijakan melakukan penetapan penerima kredit sesuai tanggal permohonannya masuk. Jadi bagi masyarakat yang telah sesuai dengan kriteria calon penerima dana KMN dan lebih awal memasukkan permohonan maka besar peluangnya untuk lulus. Dalam penetapan penerima dana KMN, mengacu kepada kriteria berikut :

1. KK miskin/ rumah tangga miskin (RTM) 70% dan non RTM 30%
2. Tidak sedang meminjam atau mendapat bantuan kredit dana lainnya dalam pengembangan usaha mikro
3. Memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab

4. Pengusulan kegiatan kredit harus sesuai dengan kemampuan kegiatan usaha
5. Tercatat sebagai warga nagari Lansek Kadok dan memiliki usaha

Dari hasil wawancara dengan pengurus pokja pada proses penjarangan, wali jorong memberikan undangan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima dana pinjaman KMN. Syarat yang harus ditekankan kepada masyarakat adalah harus memiliki perputaran uang setiap harinya, dalam hal ini berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh peminjam.

Dalam penelitian ini terdapat bermacam-macam usaha dari peminjam modal yaitu warung kelontong, usaha ternak, pertanian, kolam ikan. Dimana usaha tersebut bisa mendapatkan masukan pendapatan dan bersedia mengembalikan pinjaman merupakan syarat yang memperkuat bahwa dana ini merupakan pinjaman yang harus dikembalikan. Oleh karena itu, berdasarkan wawancara dengan Jamaluddin selaku ketua bidang perencanaan mengatakan bahwa iktikad dari masyarakat merupakan faktor penting dalam menetapkan penerima dana KMN ini. Dari hasil musyawarah pengurus pokja dan wali jorong maka ditetapkan 82 orang sebagai penerima KMN tahap I.

4.2.3.5 Kesepakatan Aturan Modal Bergulir

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kesepakatan aturan modal bergulir nagari juga ditetapkan tanggal 01 November 2008 dilaksanakan di kantor wali nagari, anggota penerima dana bersama-sama menetapkan aturan modal bergulir dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Camat Rao Selatan, Wali Nagari, sekretaris wali nagari, tokoh masyarakat, wali jorong dan masyarakat penerima dana KMN. Aturan modal bergulir nagari terkait dengan jangka waktu pengembalian, besaran dana bantuan modal bergulir, tata cara pengembalian angsuran yang dituangkan dalam kesepakatan melalui musyawarah nagari yang memutuskan :

1. Pendapatan dalam musyawarah nagari mengenai kelompok penerima awal dan kelompok tunggu dari kredit mikro nagari;

2. Adanya pemahaman dan tekad bersama bahwa dana bergulir harus dibayar kembali dengan tanpa bunga dan jadwal pengembalian sesuai kesepakatan yaitu mulai tanggal 5 bulan pertama sampai tanggal 15 pada bulan ke tiga;
3. Jangka waktu pengembalian antara 12 sampai 21 bulan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penerima dana KMN yang mampu melunasi cicilan di bawah 21 bulan;
4. Peminjam dikenakan biaya untuk jasa administrasi sebesar Rp. 5000 pada waktu awal pengurusan;
5. Adanya sanksi sosial terhadap anggota yaitu setiap anggota yang tidak membayar maka cicilan pada bulan tersebut dibebankan pada kelompok yang bersangkutan, jika lebih dari 2 bulan menunggak maka namanya diumumkan di kantor Wali nagari, pokja kan memberikan banko surat panggilan kepada masyarakat yang menunggak;
6. peminjam harus menyertakan ahli waris untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran apabila yang bersangkutan mendapat musibah/kemalangan. Keterlibatan ahli waris ini tidak ada dalam petunjuk teknis, hal ini merupakan kebijakan dari Ketua Pokja Nagari Lansek Kadok.

Keputusan ini dibuat berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat sehingga diharapkan masyarakat bisa mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Namun realita dilapangan, sanksi yang telah ditetapkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dana KMN. Dimana tidak adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang menunggak dalam membayar cicilan.

Dari wawancara dengan responden, terdapat responden yang sudah menunggak 5 bulan, namun belum ada teguran dari pokja ataupun wali jorong. Kesepakatan aturan modal bergulir nagari ini belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Program KMN karena sanksi sosial yang ditetapkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam kegiatan perencanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok. Berikut akan diuraikan mengenai kesesuaian kegiatan perencanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan juknis pada Tabel 8.

Tabel 8. Kesesuaian Perencanaan Program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan Juknis

Kegiatan	Juknis	Pelaksanaan	Keterangan
Identifikasi penerima dana KMN	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang tidak bemasalah dengan dana bergulir dimasa lalu • Mempunyai usaha kecil dan prospek untuk perkembangannya • Kelompok tergabung dalam usaha yang sejenis • Persentase tertinggi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat penerima bantuan BLT • Memiliki usaha atau penghasilan • Kelompok tergabung dalam usaha yang berbeda-beda • Persentase tertinggi penduduk non miskin 	Tidak sesuai, karena kriteria identifikasi dalam juknis berbeda dengan yang dilapangan
Penyusunan prioritas penerima dana KMN	<ul style="list-style-type: none"> • KK miskin 70% dan non KK miskin 30% • Pinjaman modal untuk usaha produktif • Dana diperuntukan bagi penambahan modal • Usaha yang cepat Menghasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> • KK miskin 30% dan non miskin 70% • Masyarakat yang mempunyai usaha dan penghasilan • Memiliki kemauan dan kemampuan membayar cicilan • Mempunyai iktikad baik 	Tidak sesuai, karena penerima dana kredit adalah persentase non KK miskin yaitu 70% dan non KK miskin 30%
Kesepakatan aturan modal bergulir nagari	<p>Musyawarah nagari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kelompok awal dan kelompok tunggu • Lamanya angsuran • Sanksi modal • Dan bergulir harus dibayar kembali dengan tanpa bunga dan jadwal Pengembalian sesuai dengan yang disepakati 	<p>Musyawarah nagari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kelompok awal 82 dan kelompok tunggu 74 orang • Lamanya angsuran 12-21 bulan • Dana bergulir dibayar kembali yang diperkuat dengan adanya surat perjanjian, jadwal pengembalian tanggal 5-20 setiap pada bulan ke 3 • Sanksi sosial: • Apabila macet maka untuk pinjaman selanjutnya tidak akan diberi pinjaman, • Pokja akan memberikan blanko surat peringatan dan surat panggilan 	Sesuai, tapi ada sedikit aturan tambahan dari nagari
Penilaian kelayakan usaha dan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Secara administratif dan verifikasi langsung ke lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara administratif dan survey lapangan 	Sesuai
Penetapan penerima kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok penerima kredit sesuai usulan wali nagari 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok penerima sesuai usulan wali nagari 	Sesuai

4.2.4. Penyaluran dan Pencairan Dana

4.2.4.1 Penyusunan dan Pengajuan Dokumen Pencairanj Dana

Dokumen pencairan dana terdiri dari surat perjanjian pemberian dana KMN (Lampiran 10), Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Dana Bantuan KMN (Lampiran 11), Berita Acara Musyawarah Nagari (Lampiran 12), Berita Acara Kelompok (Lampiran 13), daftar nama-nama penerima dana KMN dari pokja. Dokumen pencairan dana diajukan oleh ketua pokja Nagari Lansek Kadok pada tanggal 02 Desember 2008 kepada kepala BPM Kabupaten Pasaman, perihal: Mohon izin penyaluran dana KMN tahap I, diketahui Wali Nagari Lansek Kadok. Dokumen pencairan dana ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar dana KMN bisa dicairkan. Pengajuan dokumen pencairan dana mengalami keterlambatan yang seharusnya dokumen sudah harus masuk sebelum akhir November tahun 2008, ini disebabkan karena keterlambatan dokumen pencairan dana dari ketua pokja ke pemerintahan Kabupaten.

4.2.4.2 Proses Pencairan Dana KMN

Dari hasil wawancara dengan ketua pokja yang mengatakan proses penyaluran dana ke lembaga perbankan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2008 dengan syarat harus ada surat rekomendasi dari BPM. BPM memberikan surat rekomendasi ke BPD untuk dicairkan dana sebesar Rp. 300.000.000 semua dana yang dialokasikan. Selanjutnya pencairan dana dilakukan oleh pokja nagari pada akhir November 2008 dengan membawa surat rekomendasi dari BPM.

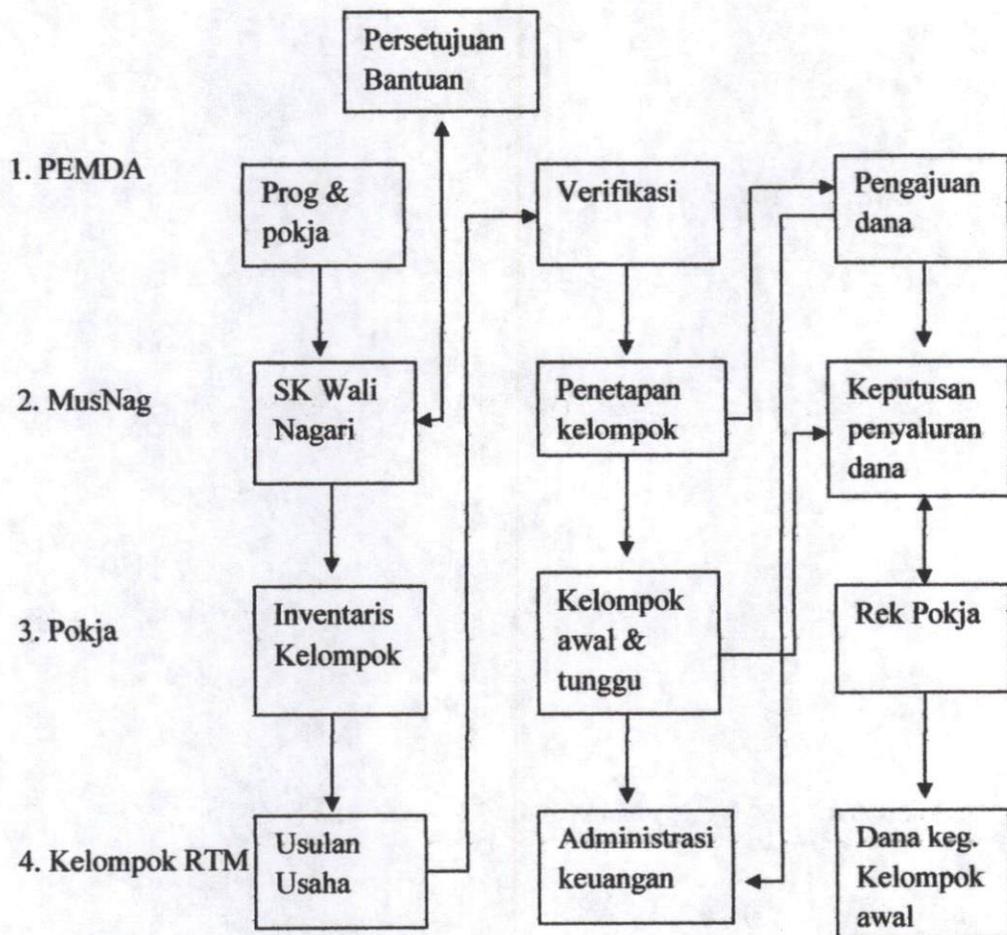
Proses penyaluran dana KMN di Nagari Lansek Kadok di Kabupaten Pasaman telah berjalan lancar. Namun dari segi waktu penyaluran dan pencairan dana tersebut masih mengalami kendala, yaitu lambatnya proses penyaluran dan pencairan dana tersebut. Untuk skala usaha ekonomi mikro penyaluran dananya langsung dari perbankan pada rekening pokja yang diteruskan kepada masyarakat. Berebeda untuk skala usaha ekonomi super mikro (individu) seperti kredit harian dibawah Rp. 500.000,- dapat dikelola oleh lembaga keuangan nagari, seperti baitul mal, LPN, dan lembaga keuangan sejenis lainnya. Di Nagari Lansek Kadok,

pencairan dana langsung melalui rekening bendahara pokja tanpa pengelola lembaga keuangan nagari.

Dana yang disalurkan ke rekening ketua pokja tidak dapat diganggu oleh pokja sebelum izin dari Bupati Kabupaten Pasaman. Dana KMN tahap II baru dapat dicairkan apabila pengembalian kredit tahap I telah mencapai 25% dan kinerja pengembalian sudah sesuai dengan yang direncanakan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar mekanisme penyaluran dana dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1 Mekanisme Penyaluran Dana



Sumber : Pokja 2008

Keterangan gambar 1:

1. Pada tahap perencanaan yaitu adanya rekomendasi dari PEMDA berupa persetujuan bantuan untuk nagari dan menyiapkan dana sebesar dana yang diberikan provinsi kepada daerah untuk program KMN.
2. Dilakukan Musyawarah Nagari pada tanggal 18 September 2008, yaitu membahas tentang program dan membentuk pokja yang dihadiri oleh elemen masyarakat nagari (tokoh masyarakat, cadiak pandai, niniak mamak, bundo kanduang, dll).
3. Wali nagari menyetujui program KMN dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap pembentukan pokja nomor 27/WN-2008 tentang pengukuhan pokja Nagari Lansek Kadok pada tahun 2008 tanggal September 2008.
4. Pokja bersama wali jorong melakukan inventaris kelompok, masyarakat dibagi dalam kelompok dengan usaha yang berbeda-beda.
5. Masyarakat mengajukan usulan usaha kepada pokja melalui wali jorong yang dilakukan pada awal September sampai akhir November 2008.
6. Pada tahap persiapan pokja melakukan verifikasi terhadap usulan usaha yang diajukan masyarakat yang dibantu oleh wali jorong dan menetapkan masyarakat yang layak menerima dana KMN.
7. Masyarakat penerima dana pinjaman KMN dibagi dua kelompok yaitu kelompok awal dan kelompok tunggu mengajukan besarnya dana pinjaman kepada pokja.
8. Masyarakat penerima dana KMN harus menyelesaikan administrasi keuangan berupa penandatanganan surat perjanjian diatas materai yang diketahui oleh ahli waris.
9. Pada tahap pelaksanaan setelah administrasi keuangan selesai dan diajukan ke kantor BPM berupa dokumen pencairan dana, dana KMN sebesar Rp. 300.000.000 sudah bisa dicairkan pada tanggal 29 Oktober 2008 ke rekening pokja BPD Cabang Tapus (2200-0210-02682-9).
10. Dana dicairkan ke kelompok awal Desember sampai akhir Desember setelah penyalurannya selesai untuk tahap I, maka dilanjutkan dengan pencairan dana untuk tahap II.

Syarat yang harus ada sewaktu pencairan dana adalah mengisi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No.03/POKJA.UKM/NLSK-2008 dari pihak pertama yaitu pokja kepada ketua kelompok sebagai pihak kedua (lampiran 10) yang ditanda tangani oleh peminjam, ahli waris, ketua pokja, dan diketahui oleh wali nagari. Peminjaman dana KMN ini kepada masyarakat miskin dibebankan jasa admisnistrasi sebesar Rp. 5000,- yang dipungut langsung pada waktu penyerahan kredit ke masyarakat, sedangkan dalam petunjuk teknis tidak ada aturan mengenai biaya tambahan.

Berdasarkan informasi dari ketua pokja bahwa biaya Rp. 3000,- ini digunakan untuk jasa pengelola dan biaya administrasi. Alur pencairan dana diatas berbeda dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bupati kabupaten pasaman dalam peraturan Bupati Pasaman nomor : 46 Tahun 2007 tentang penyaluran dana KMN.

Pelaksanaan dilapangan terlihat lebih sederhana, pada prosedur yang telah ditetapkan, setelah ditetapkan nagari penerima dana KMN, maka wali nagari melaksanakan musyawarah nagari, membahas tentang program dan membentuk pokja yang dihadiri oleh elemen masyarakat nagari (tokoh masyarakat, cadiak pandai, niniak mamak, bundo kandung, dll), namun pelaksanaannya pokja dibentuk oleh wali nagari dengan mennujuk beberapa perangkat nagari dan orang-orang yang berpengalaman dalam organisasi nagari. Hasil wawancara dengan penanggung jawab sementara (PJS) wali nagari bapak Sakmar Datuak Bandaro mengatakan, pemebntukan pembentukan pokja tidak sesuai dengan aturan dalam juknis karena kondisinya sudah mendesak dan nama-nama pengurus Pokja harus segera diserahkanke kabupaten. Setelah pengukuhan pokja, maka pokja bersama wali jorong melakukan inventaris kelompok serta mengklasifikasi jenis usaha yang ada dan membaginya berdasarkan kelompok. Dalam pelaksanaannya di Nagari Lansek Kadok, penerima dana KMN tidak dibagi dalam bentuk kelompok usaha, namun secara individu saja.

4.2.4.3 Prosedur Pengembalian Dana KMN

Pencairan dana KMN ke masyarakat terealisasi pada bulan Maret. Antara pencairan dana dengan pembayaran cicilan pertama diberi jarak 3 bulan, agar masyarakat dapat memutar uang tersebut untuk tambahan modal usaha terlebih dahulu selama 3 bulan pertama tanpa dibebani pembayaran cicilan. Pengembalian dana atau pembayaran cicilan dana KMN tahap I di mulai pada bulan Januari. Masyarakat langsung membayar cicilan ke pokja yang berada kantor wali nagari.

Pembayaran cicilan pada tanggal 10-15 setiap bulannya. Sebagai tanda bukti, masyarakat diberikan kartu tanda lunas pembayaran cicilan. Dari wawancara dengan responden, terdapat beberapa responden yang membayar cicilan tidak langsung ke pokja tapi melalui wali jorong dan ketua kelompok. Hal ini dianggap lebih memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi ke kantor pokja. Cicilan yang telah dibayarkan oleh masyarakat tersebut akan digulirkan untuk tahap berikutnya. Permasalahan timbul ketika terjadi kredit macet, sehingga dana KMN yang akan digulirkan untuk tahap berikutnya menjadi berkurang. Sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak mendapat kesempatan untuk meminjam dana KMN tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan responden, bagi masyarakat yang tidak bermasalah dan lancar dalam membayar cicilan setiap bulannya maka akan dapat kesempatan kembali untuk menerima pinjaman dana KMN tahap berikutnya. Namun masyarakat yang lancar dalam membayar cicilan setiap bulannya belum mendapatkan pinjaman dana KMN yang ketiga. Masyarakat mengaku kecewa dengan janji yang disampaikan oleh wali jorong tersebut. Mengetahui hal ini wali jorong mengatakan masyarakat yang lancar dalam membayar cicilannya akan mendapatkan kesempatan untuk meminjam kembali namun posisinya yaitu sebagai kelompok tunggu. Misalnya masyarakat tersebut meminjam pada tahap I, maka dapat meminjam kembali pada tahap 3, sedangkan untuk tahap 2 orang-orangnya sudah ada sejak dana tahap I digulirkan. Untuk melihat kesesuaian proses pelaksanaan program KMN dengan

yang ada pada petunjuk teknis program KMN tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Kesesuaian Penyaluran dan Pencairan Dana KMN di Nagari Lansek Kadok dengan yang ada pada Juknis

Kegiatan	Juknis	Di lapangan	Keterangan
Penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana - Waktu - Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Waktu: awal Oktober 2008 Dokumen pencairan dana terdiri dari: Surat permohonan izin penyaluran dana KMN tahap I, berita acara musyawarah nagari, daftar nama-nama kelompok penerima dana KMN, surat perjanjian penguatan modal usaha (SPPMU) 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu: Akhir November 2008 Dokumen pencairan dana td:surat permohonan izin penyaluran dana KMN tahap I, berita acara musyawarah nagari (administrasi pokja tidak lengkap), daftar nama-nama penerima dana KMN (tidak dibentuk secara berkelompok) dari dana APBD Kabupaten 82 orang tahap I dan 76 orang tahap 2, surat perjanjian penguatan modal usaha (SPPMU) 	Tidak sesuai, Terjadi keterlambatan menyerahkan dokumen dan masyarakat tidak terbentuk secara berkelompok
Proses pencairan dana KMN - Waktu - Mekanisme Penyaluran - Termen	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pencairan dana kemasyarakat maksimal akhir tahun 2008 Apabila pinjaman < 500.000 diambil melalui bank Dilakukan 2 tahap: tahap 1 50% (Rp.150.000.000), tahap 2 apabila kredit telah disalurkan mencapai 90% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pencairan dana ke rekening pokja 18 Oktober 2008 dan pertengahan November sudah disalurkan ke masyarakat Semua pinjaman diambil melalui pokja Dilakukan 1 tahap; tahap 1 100%(Rp. 300.000.000) diterima oleh pokja pada bulan oktober 2008 tahap 2 apabila kredit tahap I telah disalurkan, cairnya pada bulan januari 2009 	Tidak sesuai, Waktu pencairan dana pada masyarakat mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan rencana awal

Dari Tabel 9 diatas dapat dilihat terdapat beberapa perbedaan antara pelaksanaan program KMN di lapangan dengan juknis. Dalam penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana, seharusnya nama-nama penerima dana KMN dibentuk dalam kelompok-kelompok usaha, disamping itu keterlambatan pencairan dana ke masyarakat dari tanggal yang telah ditetapkan diakibatkan karena keterlambatan dalam penyerahan dokumen pencairan dana. Perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan aturan yang ditetapkan dalam juknis bisa dikatakan wajar selama tiak merubah tujuan dan sasaran dari program tersebut. Agar pelaksanaan program KMN berjalan optimal dan tepat sasaran, maka diperlukan pengawasan agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diatasi.

4.2.5. Pengawasan

Menurut Steven (1989), pengawasan adalah sistem informasi yang memonitor rencana dan proses untuk meyakinkan bahwa rencana selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan member peringatan bila perlu sehingga tindakan pemulihan dapat dilakukan. Jadi pengawasan dan pembinaan ke lapangan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dana di lapangan oleh tim pelaksana.

Di Nagari Lansek Kadok pengawasan penggunaan dana ini di lakukan oleh wali jorong, pokja dan TKPK propinsi. Pengawasan dilaksanakan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha masyarakat dan pemanfaatan dana KMN oleh masyarakat. Sehingga hasil yang diharapkan keluarga miskin mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak bergantung lagi pada orang lain.

Dalam petunjuk teknis prosedur pemantauan dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat propinsi sampai pada tingkat kelompok penerima bantuan kredit, kegiatan pemantauan yang dilakukan bai dari TKPK propinsi maupun TKPK kabupaten yang mana pada perencanaan akan dilaksanakan pada hari rabu minggu pertama setiap bulan untuk propinsi dan pada minggu ke IV setiap bulan untuk kabupaten.

Di Nagari Lansek Kadok, proses pengawasan yang berlangsung berbeda dengan yang ada pada juknis KMN. Dari hasil wawancara dengan pengurus pokja, pengawasan yang dilakukan oleh pihak kabupaten ataupun propinsi tidak rutin. Artinya pengawasan dilaksanakan tidak teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan responden memperlihatkan bahwa tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pokja terhadap keluarga miskin baik untuk meninjau perkembangan usahanya maupun untuk mendengar keluhan masyarakat. Sedangkan dalam petunjuk teknis pokja harus mengawasi setiap 2 minggu, yang melakukan pengawasan terhadap keluarga miskin adalah wali jorong. Pengawasan yang dilakukan oleh wali jorong pun tidak rutin. Tidak adanya pengawasan rutin dari pihak pengelola memicu terjadinya kredit macet. Dalam pengelola dana KMN terdapat sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila terjadi kredit macet. Jika tunggakan melebihi 3 bulan, maka akan diberikan surat peringatan (SP 1,2,3) dan jika tetap tidak ada upaya dari masyarakat untuk melunasi tunggakannya maka diberikan surat panggilan. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Kabupaten kepada Pokja berupa surat teguran apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dalam pengelola. Namun realita di lapangan, sanksi tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang di buat. Masyarakat yang menungak dalam membayar cicilannya tidak di bebani karena dari masyarakat sendiri merasa diberatkan dengan adanya bunga tersebut. Anehnya masyarakat telah menyetujui aturan pemberian bunga pinjaman jika terjadi kredit macet pada saat meminjam dana KMN, namun setelah masalah kredit macet terjadi seolah tidak ada yang bertanggung jawab terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil wawancara dari wali nagari dan Pokja didapatkan informasi bahwa mereka juga tidak bias berlalu memberatkan masyarakat karena untuk membayar cicilan saja sudah bermasalah apalagi di bebankan berupa pinjaman, hal ini akan semakin memberatkan masyarakat. Untuk melihat kesesuaian pengawasan program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan Petunjuk Program KMN tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 10. Kesesuaian Pengawasan Program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan yang ada pada Juknis

Kegiatan	Juknis	Di Lapangan	Keterangan
- Pengawasan Rapat TKPK	• TKPK-P = rabul/bulan	• Tidak ada keteraturan dalam pengawasan.	Tidak sesuai karena kurang adanya koordianasi setiap stakeholders.
- Pengawasan dari kabupaten	• TKPK-K = rabu IV/bulan	• Pengawasan dari Kabupaten tidak rutin dan tidak terjadwal.	
- Pengawasan dari jorong dan pokja	• Pokja nagari dan kelompok tunggu = senin I & III/bulan • Kelompok penerima bantuan = setiap jumat	• Pengawasan dari pokja dan wali jorong tidak rutin.	

Dari Tabel 10 diatas terlihat terdapat ketidaksesuaian kegiatan pengawasan di lapangandengan atran yang ditetapkan dalam juknis. Hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi antar stakeholder sehingga pengontrolan pengelolaan tidak terlaksana dengan baik. Dari paparan tabel diatas terlihat bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan program KMN. Disamping pengawasan juga di butuhkan kegiatan pelaporan untuk memudahkan dalam mengevaluasi pelaksanaan program KMN.

4.2.6. Laporan Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan program KMN. Melalui pelaporan maka pemerintah kabupaten dapat mengevaluasi sejauh mana perkembangan pengelola dana KMN. Jika terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program KMN maka dapat dicarikan solusinya. Pelaksanan program Kredit Mikro Nagari ini dilaporkan minimal 1 kali 3 bulan ke kabupaten. Kegiatan yang dilaporkan yaitu seluruh rangkaian program mulai dari awal sampai akhir yaitu laporan tentang pembentukan pokja yang disahkan lewat keputusan wali nagari, memberikan laporan tentang dokumentasi pencairan dana antara lain memberikan daftar nama-nama kelompok masyarakat miskin penerima dana KMN, memberikan laporan bahwa surat perjanjian penguatan modal usaha (SPPMU), memberikan laporan

pengelolaan KMN dan juga yang dilaporkan adalah persentase cicilan tiap bulannya. Dari penelitian di lapangan didapatkan informasi, Pokja KMN di Nagari Lansek Kadok telah menyerahkan laporan sebanyak 3 kali ke Kabupaten. Untuk melihat kesesuaian kegiatan pelaporan program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan yang telah ditetapkan dalam petunjuk Teknis program KMN dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Kesesuaian Pelaporan Program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan Juknis

Kegiatan	Juknis	Di Lapangan	Keterangan
Pelaporan			
- Laporan penerima ke pokja	• setiap rabu	• Masyarakat penerima bantuan ke pokja = tidak ada pelaporan	Tidak sesuai karena kurangnya koordinasi sesama pengurus dan pengurus dengan masyarakat.
- Pokja nagari ke TKPK-K	• Senin, minggu I dan Minggu II	• Pokja nagari ke TKPK-K = Laporan pengelolaan 1x/ bulan	
- TKPK-K ke TKPK-P	• Selasa minggu I dan II	• KPK-K ke TKPK-P baru 2x/bulan	
- TKPK-P ke Gubernur	• Minggu IV		

Pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Kesemua tahapan tersebut telah dilaksanakan atas kerja sama Wali Nagari, Pokja, Wali jorong dan masyarakat. Acuan dalam pelaksanaan Program KMN di lapangan adalah Juknis KMN yang telah diserahkan oleh pihak kabupaten disaat koordinasi program KMN. Teknis dan aturan pelaksanaan program KMN tertera pada Juknis masih baku dan dapat dirubah berdasarkan kondisi nagari asalkan tidak melenceng dari tujuan program KMN tersebut. Hal itulah yang terjadi dalam pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok, dimana terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan program KMN di lapangan dengan teknis yang telah ditetapkan Juknis. Berdasarkan temuan lapangan, ketidaksesuaian pelaksanaan program KMN di lapangan dengan yang tertera pada Juknis tersebut dapat merupakan dan menguntungkan bagi masyarakat peminjam dana KMN maupun tim pelaksana program .

Secara keseluruhan perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan Juknis KMN dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12. Kesesuaian Proses Pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok dengan Juknis KMN

Tahapan	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan nagari penerima KMN • Sosialisasi program KMN 	Tidak sesuai	Terjadi kecemburuan sosial akibat penyebaran informasi yang tidak merata dan penetapan nagari sebagai penerima KMN tidak jelas
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi penerima KMN • Penyusunan prioritas penerima KMN • Kesepakatan aturan modal bergulir • Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis • Penetapan penerima kredit 	Tidak sesuai, Tapi ada beberapa kegiatan yang sesuai	Wali jorong kewalahan dalam mengidentifikasi penerima dana KMN karena tidak adanya standar kelayakan usaha dan kelayakan teknis yang ditetapkan dalam nagari, survey usaha yang tidak merata terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana • Proses pencairan dana KMN • Prosedur pengembalian dana 	Tidak sesuai	Terlambatnya pencairan dana ke rek bendahara pokja yang mengakibatkan masyarakat terlambat menerima dana pinjaman
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengontrolan pemanfaatan dana KMN • Sanksi oleh pokja bagi masyarakat yang terlambat membayar cicilan • Sanksi dari pemerintah kepada pokja yang bermasalah 	Tidak sesuai	Pemanfaatan dana KMN oleh masyarakat tidak terkontrol dengan baik, sehingga terjadi kredit macet. Tidak diberlakukannya sanksi sesuai dengan yang telah dispakati mengakibatkan pelaksanaan program KMN di nagari Lansek Kadok kurang optimal.
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaporan 	Tidak sesuai	Pihak kabupaten kesulitan dalam mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program di nagari

Dari Tabel 12 diatas terlihat banyak kegiatan dalam pelaksanaan program KMN di nagari lansek kadok yang tidak sesuai dengan juknis KMN, ketidak sesuaian ini berdampak positif dan negatif bagi masyarakat penerima dana dan pihak pelaksana.

4.3. Mendeskripsikan Karakteristik Pengguna Dana Kredit Mikro Nagari (KMN)

Terdapat beberapa faktor yang terjadi di lapangan yang menyebabkan macetnya pengembalian dana KMN di Nagari Lansek Kadok, yaitu dilihat dari karakteristik personal responden, karakteristik usaha, dan karakteristik kredit. karakteristik personal mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga. Karakteristik usaha mencakup pengalaman usaha, dan pendapatan usaha. sedangkan karakteristik kredit mencakup jumlah pinjaman, dan pengalaman kredit.

4.3.1. Karakteristik Personal Pengguna Dana KMN

Karakteristik personal responden diklasifikasikan berdasarkan variabel jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tanggungan keluarga yaitu:

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin perempuan memiliki loyalitas yang besar dan lebih mampu menjaga kepercayaan yang diberikan dalam memenuhi kewajiban angsuran kredit dibandingkan laki-laki sehingga perempuan memiliki peluang pengembalian dengan lancar lebih besar daripada laki-laki (Haloho, 2010). Seorang perempuan biasanya lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan laki-laki lebih mengedepankan pikirandalam suatu tindakannya. Perempuan juga disinyalir lebih perhatian terhadap permasalahan utang dibanding laki-laki. Kaitannya dengan pengembalian KMN, diduga bahwa perilaku pengembalian KMN (lancar maupun menunggak) berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin tersebut. Namun berbeda dengan yang terdapat dilapangan berdasarkan quisioner dan wawancara dilapangan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap macetnya pengembalian dana KMN karena penerima (responden) lebih mendominasi laki-laki daripada perempuan, jadi tidak bisa

dikatakan perempuan memiliki peluang pengembalian dengan lancar. Hal ini terlihat dari Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Jenis Kelamin Pengguna Dana KMN

Jenis kelamin	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Laki-laki	10	24,4	15	36,6	25	61,0
Perempuan	6	14,6	10	24,4	16	39,0
Total	16	39	25	61	41	100

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden secara keseluruhan didominasi oleh laki-laki sebesar 61,0 persen yakni sebanyak 25 orang dan sisanya adalah perempuan sebanyak 16 orang. Responden yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi masing-masing kategori pengembalian kredit baik yang lancar maupun yang menunggak (24,4 persen dan 36,6 persen). Sedangkan jenis kelamin perempuan masing-masing kategori baik yang lancar maupun yang menunggak adalah 14,6 persen dan 24,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki sedikit lancar dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, dan jika dikaitkan dengan pendapat diatas berbeda dengan hasil dilapangan yang mengatakan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki peluang lebih lancar dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki.

b. Umur

Umur berpengaruh positif terhadap kelancaran kredit karena umur yang lebih muda menunjukkan produktifitas yang lebih tinggi disbanding dengan umur yang lebih tua yang yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha kearah yang lebih baik. Berdasarkan hasil qisioner memang umur yang lebih tua kurang dalam berproduktifitas hal ini disebabkan juga karena tenaga yang dimilikinya sudah berkurang dalam pengembangan usahanya dan kesadaran dari mereka dalam pengembalian membayar cicilan karena sebagian dari mereka telah berpengalaman dalam menerima bantuan sebelumnya. Hal ini terlihat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14. Umur Pengguna Dana KMN

Umur (Tahun)	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
21-30	6	14,6	3	9,8	9	22
31-40	5	12,2	4	9,8	9	22
41-50	4	9,8	14	34,1	19	46,3
>50	1	2,4	3	7,3	4	9,7
Total	16	39	25	61	41	100

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada kisaran umur 21 tahun hingga 50 tahun yakni sebesar 90,3 persen (21,9%+21,9%+46,3%). Sebagian besar pengguna yang lancar dalam pengembalian juga berkisar 21-30 tahun yaitu 14,6 persen. Dan sebagian besar pengguna yang menunggak dalam pengembalian adalah berumur 41-50 tahun yaitu 34,1 persen (14 orang dari 19 orang). Dan Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur akan semakin menurun produktifitasnya dalam pengembangan usaha.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan diduga berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian kredit karena semakin tinggi tingkat pendidikan penerima menunjukkan kemampuan manajerial yang semakin baik dalam pengelolaan usaha. Berbeda dengan yang terdapat di lapangan berdasarkan kuisioner dan wawancara di lapangan penerima yang banyak menunggak adalah yang berpendidikan SMP, SMA, dan Diploma malaha yang berpendidikan SD yang lancar dalam pengembalian dana. Hal ini berebeda dengan pendapat diatas semakin tinggi pendidikan seseorang malah semakin tinggi tingkat kemacetan dalam pengembalian dana bahkan penerima yang berpendidikan Diploma juga ada yang menunggak. Penemuan di lapangan usia tidak berpengaruh karena selagi mereka masih mempunyai kemampuan untuk berusaha pokja memberikan kesempatan kepada mereka yang mengembangkan usahanya. Dana kredit diberikan kepada penerima yang berusia 21 tahun sampai diatas 50 tahu. Hal ini terlihat pada Tabel 15 berikut :

Tabel 15. Tingkat Pendidikan Pengguna Dana KMN

Pendidikan	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
SD	5	12,2	3	7,4	8	19,5
SMP	4	9,8	6	14,6	10	24,4
SMA	6	14,6	14	34,1	20	48,8
Diploma	1	2,4	2	4,9	3	7,3
Total	16	39	25	61	41	100

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar pengguna berpendidikan SMP hingga SMA yakni sebesar 73,2 persen (24,4%+48,8%). sebagian besar pengguna yang lancar dalam pengembalian kredit berpendidikan SD yaitu 12,2 persen (5 orang) dari 8 orang pengguna, dibandingkan pengguna yang berpendidikan SMP, SMA, dan Diploma. Pengguna yang paling banyak menunggak adalah yang tingkat pendidikannya SMA yaitu 34,1 persen (14 orang) dari 20 orang pengguna karena pengguna yang berpendidikan SMA mendominasi secara keseluruhan. Hal ini menarik, ternyata masyarakat yang berpendidikan SD memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk melunasi pinjamannya. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2008) di nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman bahwa tingkat pendidikan responden yang masih rendah merupakan penyebab terhambatnya pengembalian dana KMN, hal ini disebabkan karena responden yang berpendidikan rendah tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha mereka, sehingga menyebabkan usaha keluarga miskin sulit berkembang, dari hasil penelitian di nagari lansek kadok sama halnya dengan hasil penelitian Inya di nagari Cupak, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat miskin yang berpendidikan rendah memiliki pengalaman usaha yang minim dalam pengembangan usahanya.

d. Jumlah Tanggungan Keluarga

Banyaknya jumlah tanggungan dalam suatu keluarga akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan pada akhirnya akan mengurangi proporsi pendapatan yang sedianya dialokasikan untuk membayar kredit. Hal

tersebut tentunya dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam membayar angsuran kredit. Ini sama dengan yang terjadi dilapangan, berdasarkan quisioner dilapangan jumlah tanggungan yang banyak sangat berpengaruh terhadap macetnya pengembalian dana, hal ini disebabkan karena banyak penerima dana yang menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang sekolah anak-anak mereka bertepatan dengan pembayaran cicilan pengembalian dana. Hal ini terlihat pada Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Jumlah Tanggungan Keluarga Pengguna Dana KMN

Tanggungan keluarga (orang)	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
<2	11	26,8	10	24,4	21	51,22
>2	5	12,2	15	36,6	20	48,78
Total	16	39	25	61	41	100

Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang lancar dalam pengembalian kredit memiliki tanggungan keluarga dibawah atau 2 orang tanggungan keluarga yaitu 26,8 persen. Dan responden yang menunggak dalam pengembalian kredit umumnya memiliki tanggungan diatas 2 orang yaitu 36,6 persen. Hal ini berarti jumlah tanggungan keluarga merupakan faktor yang menghambat pengembalian KMN, semakin banyak tanggungan keluarga semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan dan akan mengurangi pendapatan yang telah di sediakan untuk membayar cicilan kredit.

4.3.2 Karakteristik Usaha Pengguna Dana KMN

Karakteristik usaha masing-masing pengguna dana diidentifikasi berdasarkan pengalaman usaha dan pendapatan usaha perbulan yaitu:

a. Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha menunjukkan kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu usaha. semakin lama pengalaman usaha seseorang maka kemampuannya dalam mengelola usaha akan semakin baik. harapannya, semakin lama usaha yang

dilakukan penerima KMN, maka peluang keberhasilan usaha akan semakin besar pula dengan sendirinya dapat menjamin kemampuan penerima, hal ini berbeda dengan yang ada dilapangan pengguna yang pengalaman usahanya sudah lama banyak yang menunggak disebabkan karena pengalaman usaha yang baru menyadari bahwa tanggung jawab mereka dalam mengembalikan dana KMN. Hal ini terlihat pada Tabel 17 dibawah ini :

Tabel 17. Pengalaman Usaha Pengguna Dana KMN

Pengalaman usaha (tahun)	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
<1	2	4,9	3	7,3	5	12,3
1-3	5	12,2	7	17,1	12	29,3
4-6	4	9,7	5	12,2	9	21,9
>6	5	12,2	10	24,4	15	36,6
Total	16	39	25	61	41	100

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman usaha 1-3 tahun dan diatas 6 tahun yaitu 29,3 persen dan 36,6 persen. Sebagian besar responden yang menunggak dalam pengembalian kredit memiliki pengalaman usaha diatas 6 tahun yaitu 24,2 persen (10 orang dari 15 orang). Dan responden yang lancar dalam pengembalian adalah dibawah 1-3 tahun yakni 12,2 persen (5 orang dari 7 orang). Hal ini menunjukkan bahwa bukan berarti semakin lama pengalaman usahanya berarti lancar dalam pengembalian.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pengalaman berusaha memang berpengaruh dalam pembayaran cicilan kredit, tidak ada perbedaan pengalaman berusaha dalam pembayaran cicilan dana KMN baik yang pengalaman usahanya < 1 tahun maupun yang > 6 tahun. Hal ini terlihat dengan adanya responden yang menunggak terbesar telah mempunyai pengalaman berusaha > 6 tahun yaitu 24,4 persen (10 dari 15 orang). Sedangkan responden yang memiliki pengalaman berusaha < 1 tahun juga menunggak dalam melunasi cicilannya. Dari wawancara di lapangan, sebagian besar responden yang meminjam dana KMN ini tidak memanfaatkan dana tersebut 100% untuk pengembangan usaha, tetapi digunakan untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan membayar pinjaman kredit lainnya.

Batubara *cit* Dewi (2008) mengatakan bahwa kredit yang disalurkan kedaerah pedesaan pada umumnya dimaksud untuk tujuan produktif. Namun karena kebutuhan konsumtif belum terpenuhi maka pengalihan tujuan kredit tidak dapat dihindarkan. Kasus seperti ini yang terjadi pada pinjaman dana KMN di nagari Lansek Kadok.

Penelusuran informasi dari tim pelaksana dalam hal ini yang bertugas adalah wali jorong tunggakan yang terjadi pada kelompok usaha ini di sebabkan karena munculnya kelompok usaha dadakan dan juga kelompok usaha fiktif menjelang program KMN berjalan, sedangkan mereka belum mengetahui apakah usahanya memiliki resiko kegagalan yang besar atau kecil. Hal ini menandakan proses identifikasi yang dilakukan wali jorong tidak tepat arena memberikan kesempatan kepada kelompok usaha dadakan untuk tetap menerima dana KMN. Ini juga disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana (pokja dan aparat nagari) berdasarkan juknis tidak lagi menjadi acuan dalam kucuran dana KMN, dimana dalam juknis usaha yang berhak menerima dana KMN adalah usaha yang sudah memiliki kelompok sebelum adanya Program KMN dan sudah terlembaga. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa proses identifikasi yang dilakukan oleh wali jorong tanpa melihat pengalaman berusaha penerima program menghambat pengembalian dana KMN di Nagari Lansek Kadok karena tunggakan banyak terjadi pada responden yang usahanya berjalan > 6 tahun yaitu 40%. Kondisi ini berarti tergantung kepada bagaimana pola pikir penerima terhadap pengembalian dana KMN.

b. Pendapatan Usaha Penerima

Menurut Raharja dan Manurut (2002) pendapatan adalah penerimaan seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pada hakekatnya, petani dalam menjalankan usaha pertaniannya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya agar kebutuhan keluarganya dapat dipenuhi (Mosher, 1997). Pendapatan merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha dan keluarganya. Semakin tinggi pendapatan usaha penerima KMN maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan. Kaitannya dalam pengembalian kredit adalah dengan tingginya pendapatan

penerima KMN maka kemampuannya dalam mengembalikan kredit lancar akan terjamin. Hal ini berbeda dengan penemuan dilapangan penerima kredit memiliki pendapatan diatas 1 juta sampai 3 juta sebanding dengan jumlah pinjaman yang diterima pengguna dana KMN, namun dalam pengembalian dana yang berpendapatan dibawah 1 tahun yang lancar dalam pengembalian dana dibandingkan yang berpendapatan diatas 1 tahun. Hal ini terlihat pada Tabel 18 berikut :

Tabel 18. Total Pendapatan Usaha Responden

Total pendapatan (juta rupiah/bulan)	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
<1	5	12,2	5	12,2	10	24,4
1-3	6	14,6	11	26,8	17	41,4
>3	5	12,2	9	22	14	34,2
Total	16	39	25	100	41	100

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki total pendapatan per bulan diatas satu juta yaitu 75,6 persen (41,4%+34,2%). Responden yang menunggak dalam pengembalian kredit sebagian besar memiliki pendapatan perbulan di bawah 1-3 juta yakni 26,8 persen (11 dari 17 orang), sedangkan responden yang lancar dalam pengembalian sebagian besar responden yang pendapatan perbulan dibawah 1 juta 12,2 persen (5 orang dari 10 orang). Berdasarkan hasil Tabel diatas bukan berarti penerima yang berpendapatan tinggi akan lancar dalam pengembalian kredit tetapi hasil diatas menunjukkan penerima yang berpendapatan rendah yang lancar dalam pengembalian kredit.

4.3.3 Karakteristik Kredit Pengguna Dana KMN

Karakteristik kredit responden diklasifikasikan berdasarkan jumlah pinjaman, dan pengalaman kredit yaitu:

a. Jumlah Pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman kredit yang diberikan oleh Pokja tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan pembayaran seorang penerima, namun, pinjaman kredit yang besar juga akan mengakibatkan beban angsuran yang

besar pula bagi penerima KMN dalam pelunasannya sehingga menimbulkan resiko terhambatnya pengembalian kredit oleh penerima.

Berdasarkan dilapangan jumlah pinjaman yang diberikan kepada penerima berbeda-beda sesuai dengan usulan proposal pinjaman dan juga sesuai dengan kebutuhan pinjaman untuk usaha penerima dan modal yang tersedia. Di Nagari Lansek Kadok tidak ada penerima dana yang menerima pinjaman dibawah 1 juta, jumlah pinjaman rata-rata 2 juta sampai 5 juta karena kebutuhan modal usaha mereka lumayan besar.

Penerima yang mendapatkan pinjaman adalah sebagian besar masyarakat yang telah memiliki usaha. Berdasarkan wawancara dengan pokja penerima tersebut memang disengaja persentasenya tertinggi non KK miskin karena berdasarkan pengalaman kredit sebelumnya dana diberikan kepada KK miskin tapi masih banyak dana yang tidak kembali, hal ini terjadi Karena adanya pemutihan terhadap dana yang diberikan, masyarakat menganggap dana yang diberikan adalah hak mereka karena dana tersebut dari pemerintah. Dengan diberikan kepada non KK miskin pokja berharap pengembalian dana KMN ini akan lancar sesuai dengan harapan, namun kenyataannya dilapangan banyak penerima dana yang menunggak. Hal ini terlihat pada Tabel 19 berikut :

Tabel 19 Jumlah Pinjaman Responden

Jumlah pinjaman (juta rupiah)	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
2-3	11	26,8	8	19,5	19	46,4
3-4	3	7,3	6	14,6	9	22
4-5	2	4,9	11	26,8	13	31,7
Total	16	39	25	61	41	100

Berdasarkan Tabel 19 diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden memperoleh pinjaman kredit antara 2-3 juta dan 4-5 juta yakni sebesar 46,4 persen dan 31,7 persen. Sebagian responden yang tergolong lancar dalam pengembalian kredit memperoleh pinjaman 2-3 juta yaitu 26,8 persen (11 dari 19 orang) responden. Dan responden yang menunggak dalam pengembalian kredit memperoleh pinjaman 4-5 juta yakni 26,8 persen (11 dari 14 orang). Hal ini terlihat bahwa semakin tinggi jumlah pinjaman semakin banyak yang menunggak dalam pengembalian dana.

b. Pengalaman Kredit

Pengalaman kredit merupakan frekuensi/intensitas penerima KMN dalam memperoleh pinjaman kredit. Pokja tentunya akan memberikan kepercayaan lebih kepada penerima yang telah melunasi seluruh pinjaman kreditnya dengan lancar pada kredit sebelumnya. Berbeda dengan quisioner dilapangan banyak penerima yang pengalaman kreditnya baru pertama kali mendapatkan bantuan kredit, penerima yang banyak menunggak adalah penerima yang belum pernah mendapatkan bantuan kredit. Hal ini terlihat pada Tabel 20 berikut :

Tabel 20. Pengalaman Kredit Pengguna Dana KMN

Pengalaman kredit (kali)	Lancar		Menunggak		Total	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
0	4	9,7	13	31,7	17	41,5
1	4	9,7	9	22	13	31,7
2	8	19,6	3	7,3	11	26,8
Total	16	100	25	100	41	100

Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang pernah memiliki pengalaman dalam menerima kredit 1-2 kali yakni sebesar 58,5 persen (31,7%+26,8%). Sebagian besar responden yang menunggak dalam pengembalian kredit yaitu belum pernah memiliki pengalaman menerima kredit. responden yang lancar dalam pengembalian kredit adalah yang 2 kali telah memiliki pengalaman dalam menerima kredit.

4.4 Manfaat yang Diperoleh Oleh Penerima Dana Program KMN

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program KMN ini yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi dengan adanya bantuan modal. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dimana melalui pemberdayaan terjadi proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Sulistiyani *cit* Nia, 2009).

Berdasarkan penelitian di lapangan, manfaat yang didapatkan masyarakat dalam pelaksanaan program KMN ini dilihat pada bulan Oktober 2007 sampai

Oktober 2008 untuk jangka sebelum adanya KMN dan bulan Oktober 2008 sampai dengan September 2010 untuk jangka waktu setelah adanya KMN belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Tidak semua usaha masyarakat penerima dana pinjaman KMN dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil quisioner terdapat responden yang gagal dalam usahanya akibat pemanfaatan dana yang kurang tepat (lampiran 7). Terutama dari individu penerima dana KMN, dimana kurang tepatnya pemanfaatan dana seperti penggunaan dana KMN untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga mengakibatkan masyarakat merugi dan kebutuhan konsumtif lainnya sehingga kesulitan dalam membayar cicilan. Namun ada juga sebagian pengguna dana yang memperoleh manfaat dari pinjaman dana KMN ini yakni terbantunya modal usaha mereka, sehingga kebutuhan konsumtif dapat terpenuhi dan masyarakat memang telah memanfaatkan dana untuk keperluan usaha atau produktif namun lebih banyak untuk keperluan konsumtif. Batubara *cit* Nia (2009) mengatakan bahwa kredit yang disalurkan ke daerah pedesaan pada umumnya dimaksudkan untuk tujuan produktif. Namun karena kebutuhan konsumtif belum terpenuhi maka pengalihann tujuan kredit tidak dapat dihindarkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program KMN di Nagari Lansek Kadok yang belum di laksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program, dimana ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ketidaklancaran pelaksanaan KMN di Nagari Lansek Kadok yaitu: Masyarakat tidak dibentuk berkelompok sesuai dengan jenis usaha, survey kelayakan usaha yang tidak merata, sanksi tidak berjalan, pengawasan yang kurang optimal dan pelaporan yang tidak sesuai dengan jadwalnya.
2. Karakteristik pengguna Dana KMN dalam pengembalian dana KMN terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan macetnya pengembalian dana tersebut yaitu: Jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, pendapatan usaha, dan jumlah pinjaman. Pengalaman usaha yang minim dapat mengakibatkan terhambatnya pengembalian dana KMN karena pengguna kurang berpengalaman dalam pengembangan usahanya dan banyaknya jumlah tanggungan mempengaruhi pengeluaran konsumsi keluarga yang dibutuhkan tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh mempengaruhi pembayaran cicilan dana KMN.
3. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program KMN ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada pengembangan usaha yang gagal dan belum terlihat penambahan tenaga kerja. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pihak pengelola dana sehingga pemanfaatan dana oleh masyarakat tidak terkontrol dengan baik. Disamping itu tidak adanya pelatihan manajemen usaha kepada masyarakat penerima KMN di nagari Lansek Kadok mengakibatkan sulit berkembangnya usaha masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pengembalian dana KMN.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang didapat, maka disarankan agar ;

1. Pelaksanaan program KMN sebaiknya dilakukan dengan petunjuk teknis pelaksanaan program yang telah ditetapkan walaupun ada perbedaan-perbedaan peraturan untuk menyesuaikan dengan kondisi di nagari. Disamping itu itu diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan di tingkat nagari dan jorong agar pelaksanaan program bisa lebih terarah sehingga program yang diberikan kepada masyarakat tidak sia-sia.
2. Diberlakukan aturan dan sanksi yang tegas, sehingga resiko yang timbul akibat faktor yang menghambat dalam pelaksanaan dan pengembalian dana KMN dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Anwar. 1974. *Ilmu Usaha Tani*. Alumni Bandung.
- Angraini, Widia, 2005. *Analisa Implementasi Program KUPEM di Kabupaten Kerinci*.
- BPS. 2006. *Angkatan Kerja, Pola Konsumsi dan Kemiskinan Penduduk*. Sumatera Barat.
- Baswir, Revrison, dkk. 2003. *Pembangunan tanpa perasaan*. ELSAM, Jakarta.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi : Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Daniel, Moehar. 2007. *Lembaga Untuk Memacu Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Tabloid Pertanian. Edisi No. 43/September/Tahun-V/2007.
- Dewi, WeniZetrika. 2008. *Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman*. [Skripsi] Universitas Andalas. Padang.
- Esmara, H. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Frihana, Nia. 2009. *Evaluasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*. [Skripsi] Universitas Andalas. Padang
- Hadiwidjaja dan Wirasasmita. 2000. *Analisa Kredit*. Pioner Jaya. Bandung.
- Haloho, Fransiscus. 2010. *Analisis pengembalian Kredit Mikro Utama*. [Skripsi] Institut Pertanian Bogor.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Israel, A. 1992. *Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang Panjang*. Universitas Andalas. Padang.
- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 2004. *Pegusaha Kecil Penting dan Kompleksitas Masalahnya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Mayrowani, H, dkk. 1998. *Kajian Ketersediaan dan Pemanfaatan Skim Kredit Untuk Menunjang Agribisnis Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Mosher, Caroline, 1992. *Third World Policy Approaches to Women in Development*. Routledge London.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya Media. Jakarta.
- Nelvi. 2007. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program P2FM*. Universitas Andalas. Padang.
- Pakpahan, 2004. *Petani Menggugat*. Max Havelaar Ind. dan GAPPERINDO, Jakarta.
- Partomo, Sartika, T. Dan Abd. Rachman, S. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Saleh, I. A. 1992. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, LP3ES* : Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama. Jakarta.
- Suharto, Edi. Phd. 2005. *Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*.
- Soekartawi, dkk. 1986. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil* Terjemahan Dari Jhon L. D. Bryan, H. UI-Press. Jakarta.
- Sukmadi dan Sudrajat, 1994. *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 2003. *Peranan Lembaga Keuangan Makro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan Otonomi Daerah*. www.ekonomirakyat.go.id.
- Suyatno, T. Dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Syukur , M. 2002. *Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumah Tangga Miskin*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. IPB.

- Syukur, M., 2006. *Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian yang Berkelanjutan*.
- Untung, B. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi : Yogyakarta.
- Wijono, WW., 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf>*.
- Yunus, M. 2006a. *Expanding Microcredit Outreach to reach the Millenium Development Goal-Some Issues for Attention (online)*, http://www.grameen-info.org/bank/Expanding_Microcredit.htm
- Yunus, M. 2006b. *Is Grameen Bank Different from Conventional Bank? (online)*, <http://www.grameen-info.org/bank/GBdifferent.htm>

Lampiran 1. Matriks Data Set Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Varibel	Indikator	Sumber	Pengumpulan Data	Analisa Data
1.	Mendeskripsikan pelaksanaan Kredit Mikro Nagari (KMN)	1. Persiapan 2. pelaksanaan 3. perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan nagari penerima Kredit Mikro Nagari - Pembentukan teknis - Koordinasi program - Siosialisasi program Kredit Mikro di Nagari - Identifikasi penerima bantuan - Penyusun prioritas penerima program Kredit Mikro Nagari - Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis - Penjaringan calon penerima dana Kredit Mikro Nagari - Kesepakatan aturan modal bergulir - Penyusun dan pengajuan dokumen - Pencairan dana - Proses pencairan dana Kredit Mikro Nagari - Prosedur pengembalian dana - Pengawasan - Pelaporan 	Data primer dan data sekunder	Wawancara dengan menggunakan quisioner	Deskriptif kualitatif

2.	Mengidentifikasi Karakteristik Pengguna Dana Kredit Mikro Nagari (KMN)	1. Karakteristik Personal 2. Karakteristik Usaha 3. Karakteristik Kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis kelamin - Usia - Tingkat pendidikan - Jumlah tanggungan keluarga - Pengalaman usaha - Pendapatan usaha - Jumlah Pinjaman - Pengalaman kredit 	Data primer dan data sekunder	Wawancara langsung dengan quisioner	Deskriptif kualitatif
----	--	--	---	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Lampiran (2) : Alokasi Dana Kredit Mikro Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	RT Penerima BLT		Nagari	Jumlah Dana (Rp)
		Jumlah	%		
	Kabupaten				
1	Kep. Mentawai	13.825	4,43	43	1.200.000.000
2	Pesisir selatan	41.414	13,25	13	3.900.000.000
3	Solok	25.089	8,02	8	2.400.000.000
4	Sawahlunto/sjj	12.921	4,13	4	1.200.000.000
5	Tanah datar	18.229	5,83	6	1.800.000.000
6	Pdg.pariaman	24.683	7,9	8	2.400.000.000
7	Agam	23.417	7,49	8	2.400.000.000
8	Lima puluh kota	20.952	6,7	6	1.800.000.000
9	Pasaman	25.978	8,31	8	2.400.000.000
10	Solok selatan	9.508	3,04	3	900.000.000
11	Dharmas raya	8.421	2,69	3	900.000.000
12	Pasaman barat	32.102	10,27	10	3.000.000.000
	Kota				
13	Padang	38.099	12,19	12	3.600.000.000
14	Solok	2.424	0,78	1	300.000.000
15	Sawahlunto/Sjj	229	0,73	1	300.000.000
16	Pdg. Panjang	948	0,3	1	300.000.000
17	Bukittinggi	4.092	1,31	1	300.000.000
18	Payakumbuh	5.217	1,67	2	600.000.000
19	Pariaman	2.998	0,96	1	300.000.000
	TOTAL	312.640		139	30.000.000.000

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kab. Pasaman

**Lampiran (3) : Penetapan Nagari dan Alokasi Program Kredit Mikro Nagari
Kab. Pasaman Tahun 2008**

No	Kecamatan	Nagari	Sumber Dana		
			APBD Prov (Rp)	APBD Kab (Rp)	
1	Bonjol	Ganggo Mudik	300.000.000	300.000.000	
2	Rao utara	Languang	300.000.000		
		Koto rajo			
		Koto Nopan	300.000.000		
3	Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sei. Lolo	300.000.000		
4	Mapat Tunggul	Muro Tais	300.000.000		
5	Rao Selatan	Langsek Kadok			300.000.000
		Lubuk Layang			300.000.000
6	Simpang Alahan Mati	Alahan Mati		300.000.000	
7	Lubuk Sikaping	Tanjung Beringin	300.000.000		
8	Tigo Nagari	Malampah	300.000.000		
		Ladang Panjang	300.000.000		
	Jumlah		2.400.000.000	12.000.000.000	

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kab. Pasaman 2008

Lampiran (4) : Daftar Nama Kelompok Penerima Dana KMN Tahun 2008

Kelompok Penerima Awal

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	Setia Usaha	Jr. I Ls. Kadap	Padi sawah, kolam ikan, warung kelontong	19.125.000,-
2.	Tuah Basamao	Jr. II Kt. panjang	Kolam ikan, padi sawah, dan ternak itik	26.000.000,-
3.	Mina Sepakat	Jr. II Kt. Panjang	Padi sawah, Ternak itik dan warung kelontong	34.000.000,-
4.	Saiyo Basamo	Jr. I Ls. Kadap	Padi sawah, kolam ikan, dan warung kelontong	40.875.000,-
5.	Mitra usaha	Jr. IV Beringin	Kolam ikan dan padi sawah dan ternak itik	33.000.000,-
6.	Beringin Setia	Jr. IV Beringin	Kolam ikan dan warung kelontong	27.000.000,-
7.	Rappade	Jr. V Ktn. Setia	Kolam ikan dan padi sawah	25.000.000,-
8.	Maju Bersama	Jr. V Ktn. Setia	Padi sawah, kolam ikan, dan warung kelontong	35.000.000,-
9.	Tunas Harapan	Jr. III Rambah	Kolam ikan dan padi sawah	30.000.000,-
10.	Harapan Berkembang	Jr. III Rambah	Kolam ikan, padi sawah dan ternak itik	30.000.000,-

Sumber : Kantor Wali Nagari Lansek Kadok, 2008

Lampiran (5). Pengembalian Dana Kredit Mikro Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2008

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Penerima (KK)	Jumlah Realisasi		
				Dana (Rp)	Pengembalian (%)	Tunggakan (%)
1	Bonjol	Ganggo mudik	203	300.000.000	93	7
2	Rao Utara	Languang	125	300.000.000	76	26
		Koto Rajo	42	300.000.000	90	10
		Koto Nopan	206	300.000.000	92	8
		Muaro Sei. Lolo	94	300.000.000	53	47
3	Mapat Tunggul Selatan	Muaro Tais	19	300.000.000	60	40
4	Mapat Tunggul	LanseK Kadok	82	300.000.000	52	48
5	Rao Selatan	Lubuk Layang	159	300.000.000	67	33
6	Simpang Alahan Mati	Alahan Mati	65	300.000.000	72	28
7	Lubuk Sikaping	Tanjung Beringin	77	300.000.000	96	4
8	Tigo Nagari	Malampah	114	300.000.000	56	44
		Ladang Panjang	141	300.000.000	69	31
Total			1327	3.600.000.000		

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), 2008

Lampiran (6) : Data Pembayaran Cicilan Kredit Bulan Januari 2009 – September 2010

No	Nama	Jenis Usaha	Alokasi Dana (Rp)	Pembayaran Cicilan Kredit (Rp)							Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V	Triwulan VI	Triwulan VII		
				jan-Mar	Apr-jun	Jul-sept	okt-Des	Jan-Mar	apr-Jun	Jul-Sept		
1.	Winrizal	Padi sawah	5.000.000	715.000	715.000	715.000	-	-	-	-	2.145.000	2.855.000
2.	Sahlan. HSB	Padi sawah	3.210.000	459.000	459.000	459.000	-	-	-	-	1.337.000	1.873.000
3.	Ramlan	Padi sawah	2.970.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	2.970.000	-
4.	Azwardi	Padi sawah	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-	-	2.860.000	2.140.000
5.	Nasib	Padi sawah	3.000.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	3.000.000	-
6.	Syamsuar	Padi sawah	5.000.000	715.000	715.000	-	-	-	-	-	1.430.000	3.570.000
7.	Rosni	Padi sawah	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
8.	Jasman	Padi sawah	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
9.	Mukhlis	Padi sawah	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
10.	Melita	Padi sawah	5.000.000	715.000	715.000	-	-	-	-	-	1.430.000	3.570.000
11.	Tina	Padi sawah	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-	-	2.860.000	2.140.000
12.	Ujang	Padi sawah	3.000.000	430.000	-	-	-	-	-	-	430.000	2.570.000
13.	Rasdi	Padi Sawah	3.000.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	3.000.000	-
14.	Dedi	Padi sawah	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	5.000.000	-
15.	Awal	Padi Sawah	2.500.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	2.500.000	-
16.	Sarpin	Kolam ikan	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	-
17.	Inis	Kolam ikan	3.000.000	430.000	430.000	430.000	-	-	-	-	1.290.000	1.710.000
18.	Yesi	Kolam ikan	3.290.000	470.000	-	-	-	-	-	-	470.000	2.820.000
19.	Icun	Kolam ikan	4.000.000	575.000	575.000	575.000	-	-	-	-	1.725.000	2.275.000
20.	Zulferi	Kolam ikan	2.500.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	2.500.000	-
21.	Iwan Adek	Kolam ikan	3.000.000	430.000	430.000	430.000	-	-	-	-	1.290.000	1.710.000
22.	Tamrin	Kolam ikan	3.320.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	3.320.000	-
23.	Mimin	Kolam ikan	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-	-	2.860.000	2.140.000
24.	Abdurrahman	Kolam ikan	3.000.000	430.000	430.000	430.000	-	-	-	-	1.290.000	1.710.000
25.	Lasmini	Kolam ikan	4.500.000	625.000	625.000	-	-	-	-	-	1.250.000	3.250.000
26.	Mastajuri	Kolam Ikan	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000
27.	Ipan	Kolam Ikan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
28.	Aminah	ternak itik	2.400.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.400.000	-

29.	Nova	ternak itik	4.000.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	4.000.000	-
30.	Sisri	ternak itik	2.400.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.400.000	-
31.	Isna	ternak itik	2.000.000	286.000	-	-	-	-	-	-	286.000	1.714.000
32.	Nani	ternak itik	2.400.000	360.000	360.000	-	-	-	-	-	720.000	1.680.000
33.	Ayuni	ternak itik	4.000.000	575.000	575.000	575.000	-	-	-	-	1.725.000	2.275.000
34.	Sieh	ternak itik	2.400.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.400.000	-
35.	M.Nur	ternak itik	2.400.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.400.000	-
36.	Simis	warung kelontong	2.000.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	2.000.000	-
37.	Salmiah	warung kelontong	2.000.000	286.000	286.000	286.000	-	-	-	-	858.000	1.142.000
38.	Solha	warung kelontong	2.000.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	2.000.000	-
39.	Masita	warung kelontong	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-	-	-	2.145.000	2.855.000
40.	Samsul	warung kelontong	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-	-	-	2.145.000	2.855.000
41.	Taufik	warung kelontong	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	5.000.000	-

Lampiran (7) : Data pemanfaatan Dana KMN

Padi Sawah

No	Jenis usaha	Alokasi Dana	Luas lahan (Ha)	Pemanfaatan Dana						Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan	Alasan
				Benih	NPK mutiara	TSP	Pupuk urea	KCl	Pestisida			
1.	Padi Sawah	5.000.000	2	-	√	√	√	-	-	2.145.000	2.855.000	Kebutuhan konsumtif
2.	Padi Sawah	3.210.000	1,5	√	-	√	√	√	√	1.275.000	1.695.000	Gagal panen
3.	Padi Sawah	5.000.000	2	-	√	√	√	-	-	2.860.000	2.140.000	Gagal panen
4.	Padi Sawah	3.000.000	1	√	-	√	√	√	√	430.000	2.570.000	Kebutuhan konsumtif
5.	Padi Sawah	5.000.000	1	√	√	√	√	√	√	1.430.000	3.570.000	Kebutuhan konsumtif
6.	Padi Sawah	3.000.000	0,5	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	Membayar cicilan kredit yg lain
7.	Padi Sawah	5.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	Membayar cicilan kredit yg lain
8.	Padi Sawah	5.000.000	2	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	Membayar cicilan kredit yg lain
9.	Padi Sawah	5.000.000	1	√	√	√	√	√	√	1.430.000	3.570.000	Kebutuah konsumtif
10.	Padi Sawah	3.000.000	0,5	√	-	√	√	√	√	430.000	2.570.000	Gagal panen
11.	Padi Sawah	2.970.000	0,5	√	√	√	√	√	√	2.970.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif
12.	Padi Sawah	5.000.000	1,5	-	-	√	√	√	√	5.000.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif
13.	Padi Sawah	5.000.000	2	√	√	√	√	√	√	5.000.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif
14.	Padi Sawah	3.000.000	1	√	-	√	√	-	√	3.000.000	-	Biaya Produktif
15.	Padi Sawah	2.000.000	1	-	√	√	√	√	-	2.000.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif

Kolam Ikan

No	Jenis Usaha	Alokasi Dana	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan Dana			Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan	Alasan
				Bibit ikan	Pakan ikan	Pupuk			
1.	Kolam Ikan	3.000.000	1,5	√	√	√	1.000.000	2.500.000	Gagal panen
2.	Kolam Ikan	5.000.000	2	-	√	-	1.290.000	1.710.000	Gagal panen
3.	Kolam Ikan	3.290.000	0,5	-	-	-	-	3.290.000	Membayar cicilan kredit yg lain
4.	Kolam Ikan	4.000.000	1	√	√	√	1.725.000	2.275.000	Gagal panen
5.	Kolam Ikan	3.000.000	1	√	√	√	1.290.000	1.710.000	Gagal panen
6.	Kolam Ikan	3.320.000	1	√	√	-	1.425.000	1.895.000	Kebutuhan konsumtif
7.	Kolam Ikan	3.000.000	0,5	-	√	-	1.290.000	1.710.000	Kebutuhan konsumtif
8.	Kolam Ikan	4.500.000	2	-	√	-	1.250.00	3.250.000	Kebutuhan konsumtif
9.	Kolam Ikan	4.100.000	1	-	-	-	-	4.100.000	Membayar cicilan yang lain
10.	Kolam Ikan	2.500.000	1	√	√	√	2.500.000	-	Biaya Produktif
11.	Kolam Ikan	3.320.000	1	√	√	-	3.320.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif
12.	Kolam Ikan	3.500.000	1,5	√	-	-	3.500.000	-	Biaya Produktif

Ternak Itik

No	Jenis usaha	Alokasi Dana	Pemanfaatan Dana	Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan	Alasan
			Pembelian Itik			
1.	Ternak Itik	2.000.000	√	286.000	1.714.000	Gagal panen
2.	Ternak Itik	2.400.000	√	720.000	1.680.000	Gagal panen
3.	Ternak Itik	4.000.000	√	1.725.000	2.275.000	Gagal panen
4.	Ternak Itik	2.400.000	√	2.400.000	-	Biaya Produktif
5.	Ternak Itik	4.000.000	√	4.000.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif
6.	Ternak Itik	2.400.000	√	2.400.000	-	Biaya Produktif dan Konsumtif
7.	Ternak Itik	2.400.000	√	2.400.000	-	Biaya Produktif
8.	Ternak Itik	2.400.000	√	2.400.000	-	Biaya Produktif

Warung Kelontong

No	Jenis Usaha	Alokasi Dana	Pemanfaatan Dana							Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan	Alasan
			Minyak goreng	Minyak tanah	Gula pasir	Plastik pembungkus	Karet pengikat	Kopi	garam			
1.	Warung Kelontong	5.000.000	√	√	√	√	√	-	√	858.000	1.142.000	Biaya konsumtif
2.	Warung Kelontong	5.000.000	√	√	√	-	√	√	√	1.144.000	856.000	Biaya konsumtif
3.	Warung Kelontong	2.000.000	√	√	√	√	√	-	-	2.145.000	2.885.000	Biaya konsumtif
4.	Warung Kelontong	2.000.000	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	-	Biaya Produktif
5.	Warung Kelontong	2.000.000	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	-	Biaya Produktif
6.	Warung Kelontong	2.000.000	√	√	√	-	√	√	√	2.000.000	-	Biaya Produktif

Data Olahan, 2011

Lampiran 8. Data Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan

No	Jumlah Pinjaman	Jenis Usaha	Dana yang Tersedia	Dana yang Dibutuhkan	Keterangan
1.	5.000.000	Padi sawah	-	-	Jumlah pinjaman yang diberikan oleh pokja berdasarkan atas permintaan dari peminjam.
2.	3.210.000	Padi sawah	-	-	
3.	2.970.000	Padi sawah	-	-	
4.	5.000.000	Padi sawah	2.419.000	7.419.000	
5.	3.000.000	Padi sawah	2.299.975	5.299.975	
6.	5.000.000	Padi sawah	-	-	
7.	3.000.000	Padi sawah	-	-	
8.	5.000.000	Padi sawah	2.325.000	7.225.000	
9.	5.000.000	Padi sawah	-	-	
10.	5.000.000	Padi sawah	-	-	
11.	5.000.000	Padi sawah	-	-	
12.	3.000.000	Padi sawah	2.999.975	5.299.975	
13.	3.000.000	Padi Sawah	-	-	
14.	5.000.000	Padi sawah	-	-	
15.	2.500.000	Padi Sawah	-	-	
16.	3.500.000	Kolam ikan	-	-	
17.	3.000.000	Kolam ikan	1.299.800	4.272.800	
18.	3.290.000	Kolam ikan	-	-	
19.	4.000.000	Kolam ikan	1.121.800	5.121.800	
20.	2.500.000	Kolam ikan	-	-	
21.	3.000.000	Kolam ikan	-	-	
22.	3.320.000	Kolam ikan	-	-	
23.	5.000.000	Kolam ikan	-	-	
24.	3.000.000	Kolam ikan	98.800	3.098.000	
25.	4.500.000	Kolam ikan	-	-	
26.	4.100.000	Kolam Ikan	-	-	
27.	5.000.000	Kolam Ikan	-	-	
28.	2.400.000	ternak itik	-	-	
29.	4.000.000	ternak itik	-	-	
30.	2.400.000	ternak itik	-	-	
31.	2.000.000	ternak itik	-	-	
32.	2.400.000	ternak itik	-	-	
33.	4.000.000	ternak itik	-	-	
34.	2.400.000	ternak itik	-	-	
35.	2.400.000	ternak itik	-	-	
36.	2.000.000	warung kelontong	-	-	
37.	2.000.000	warung kelontong	-	-	
38.	2.000.000	warung kelontong	-	-	
39.	5.000.000	warung kelontong	-	-	
40.	5.000.000	warung kelontong	-	-	
41.	5.000.000	warung kelontong	-	-	

Lampiran 9. Jumlah Sampel Penelitian

No	Jenis Usaha	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Proporsi (%)
1.	Padi Sawah	30	15	36,6
2.	Kolam Ikan	24	12	29,3
3.	Ternak Itik	16	8	19,5
4.	Warung Kelontong	12	6	14,6
Total		82	41	100

Lampiran 10

PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
- Jabatan : Ketua Pokja Nagari Pelaksanan Kredit Mikro.
Nagari :
- Kecamatan.....
Kabupaten Pasaman

Berdasarkan musyawarah LPM dan pemerintah nagari tanggal.....bertindak atas nama Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab.:Pasaman selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok.....(Pengelola Kredit Mikro
Nagari.....Kecamatan..... Kab. Pasaman)

Berdasarkan kesepakatan Musyawarah LPM dan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan pada tanggal.....ditunjuk sebagai ketua Kelompokselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama menyetujui Pembayaran Kredit Mikro Nagari tahun 2008 yang bersal dari APBD Propinsi Sumatera barat, sebesar Rp.....(.....)
Melalui BPR Nagari Nomor Rekening.....
- (2) Dana tersebut disetujui untuk kegiatan Kelompok..... dengan jenis Usahayang beranggotakan KK Miskin dan KK Non Miskin sebanyakOrang.
- (3) Pihak kedua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana bantuan tersebut kepada Ketua Pokja nagari Pengelola Kredit Mikro dalam jangka waktuBulan melalui rekening No.....pada BPR Bankterhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama sebesar Rp.....
Dalam hal ini Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban ,pencairan dana bantuan tahap kedua tidak dapat dilaksanakan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak kedua sepakat berjanji akan mematuhi aturan kebijakan pelaksanaan pengelolaan Kredit mikro nagari dan bersedia menerima Sanksi apabila dalam

pelaksanaannya tidak mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan Musyawarah LPM/Nagari.

- (5) Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada anggota Kelompok sesuai usulan yang diajukan dan telah disetujui oleh ketua Pokja dan Wali nagaridan Penyerahan dana tersebut dibuat dalam Berita Acara Serah terima kepada masing-masing Anggota Kelompok /tanda terima.

Demikian Surat perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Ketua Pokja
Nagari.....

pihak Kedua
Ketua Kelompok
.....
Nagari.....

()

()

Mengetahui :

Kasi PM Kecamatan..... Wali Nagari.....

()

()

Camat.....

()

Lampiran II

**SURAT PERJANJIAN
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN DANA
BANTUAN KREDIT MIKRO NAGARI 2008**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Ketua KelompokPenerima Kredit Mikro Nagari
 Nagari :
 Kecamatan :

Berdasarkan hasil keputusan Masyarakat, LPM dan Pemerintahan Nagari, selanjutnya disebut **Pihak Pertama (I)**.

- II. Nama :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua (II)**.

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat mengadakan perjanjian penyerahan dan penerimaan Dana Kredit Mikro Nagari yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk menambah modal usaha kegiatan

Perjanjian penyerahan dan penerimaan dana Kredit Mikro Nagari diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Jangka waktu pengembalian Kredit Mikro Nagari kepada ketua pokja (Pengelola KMN.....) adalah selama Bulan.
- (2) Pengembalian disetorkan ke Rekening Nomorpada Bank.....atas nama ketua Pokja (pengelola KMN).

Pasal 2

- (1) Jumlah dana yang diserahkan adalah, sebesar Rp.....(.....)melalui nomor rekening.....Bank.....
- (2) Pengembalian/cicilan pokok dilakukan setiap...../bulan, terhitung sejak tanggal penyerahan dan penerimaan dana.

Pasal 3

- (1) Apabila pengembalian dana Kredit Mikro Nagari oleh Pihak Pertama tidak bisa dilakukan oleh kelalian dan kesengajaan maka Pihak Kedua menjatuhkan sanksi dengan hasil musyawarah LPM dan Pemerintahan Nagari.
- (2) Ketidak mampuan Pihak Pertama mengembalikan dana oleh musibah, bencana alam dan keadaan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan pengembalian kredit akan dipertimbangkan dalam rapat anggota dan menjadi keputusan bersama bagi penyelasainnya dan dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sijunjung melalui Ketua Pokja Nagari.

Pasal 4

- (1) Bila dalam masa penggunaan dimana Kredit Mikro Nagari oleh anggota kelompok terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam persepsi aturan dan ketentuan baik hak dan kewajiban Pihak Kedua memberi wewenang kepada Ketua Kelompok (Pihak Pertama) maka akan ditempuh cara musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri oleh Ketua Pokja Penanggulangan Kemiskinan dan Wali Nagari yang bersangkutan.
- (2) Bila penyelesaian musyawarah pertama tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan antara Pihak pertama dan Pihak kedua maka penyelesaian yang akan ditempuh adalah melalui jalur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Camat yang bersangkutan.

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini maka kedua belah pihak setuju untuk mematuhi pasal-pasal tersebut diatas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

Ketua LPM

Mengetahui

Wali Nagari.....

(.....)

(.....)

Lampiran 12

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH LPM DAN PEMERITAHAN NAGARI
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK PENERIMA KREDIT MIKRO
NAGARI (KMN) DARI DANA APBD
PROPINSI SUMATERA BARAT.**

Dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Kredit Mikro Nagari (KMN) untuk Tahun Anggaran.....di Nagari.....,Kecamatan,.....Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat maka pada :

Hari dan Tanggal :

J a m :s/d

Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan unsur Nagari/Pokja Penanggulangan Kemiskinan dengan unsur lembaga Pemerintahan Nagari, Lembaga masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Wakil dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terkait dengan pelaksanaan pengalokasian dana Kredit Mikro Nagari, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

A. Materi/Topik Rapat

1. Verifikasi data RTM
2. Inventarisasi Kelompok Usaha RTM dan jenis kegiatan
3. Penetapan Nama Kelompok calon penerima Bantuan Kredit Mikro Nagari.

B. Unsur Pimianan Rapat dan Nara Sumber.

Pimpinan Rapat :dari.....

Sekretaris/Notulis :dari.....

Narasumber : 1.....dari.....

2.....dari.....

3.....dari.....

4.....dari.....

5.....dari.....

Setelah dilakukan pembahasaaan dan diskusi terhadap materi rapat telah ditetapkan dan mejadi keputusan akhir dari rapat pertemuan/masyarakat yaitu.

1. Ditetapkan kelompok calon penerima Kredit Mikro Nagari dari APBD Propinsi sebagaimana lampiran dari berita acara ini.
2. Menetapkan nama-nama anggota calon perima dana KMN dari kelompok yang bersangkutan.
3. Menetapkan kelompok tunggu dan nama-nama anggotanya sebagai calon penerima perguliran dana KMN dari kelompok awal.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....tanggal.....

Pemimpin Musyarawah/Ketua Pokja

Notulis/Sekretaris Pokja

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Wali Nagari.....

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Camat.....

(.....)

Catatan :

*> Coret yang tidak perlu.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
KREDIT MIKRO NAGARI (KMN) TAHUN.....

Lampiran ..

KELOMPOK.....JORONG.....

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) untuk Tahun
Anggaran..... Di Jorong
Nagari.....Kecamatan.....Kabupaten Pasaman Propinsi
Sumatera Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :s/d.....
Tempat :

Telah diselenggarakan Musyawarah
Kelompok.....Jorong.....yang dihadiri oleh anggota dan
tokoh Masyarakat jorong, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Musyawarah dipimpin olehsedangkan yang bertindak sebagai
Penulis atau notulis adalah

Materi atau Topik yang dibahas dalam musyawarah ini adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah Yaitu :*

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....tanggal.....

Pemimpin Musyarawah/
Ketua Pokja Kelompok

Notulis/Penulis
Sekretaris Kelompok

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Jorong

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wali Nagari

(.....)

Catatan :

*> Coret yang ~~tidak~~ perlu.